

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**PENGELOLAAN PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA**

Oleh:

R. ALPHA AMIRRACHMAN, M.PHIL., PH.D.

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LX
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karuniaNya, penulis sebagai salah peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“PENGELOLAAN PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2020 Tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LX tahun 2020 dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenallah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LX di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuatu waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

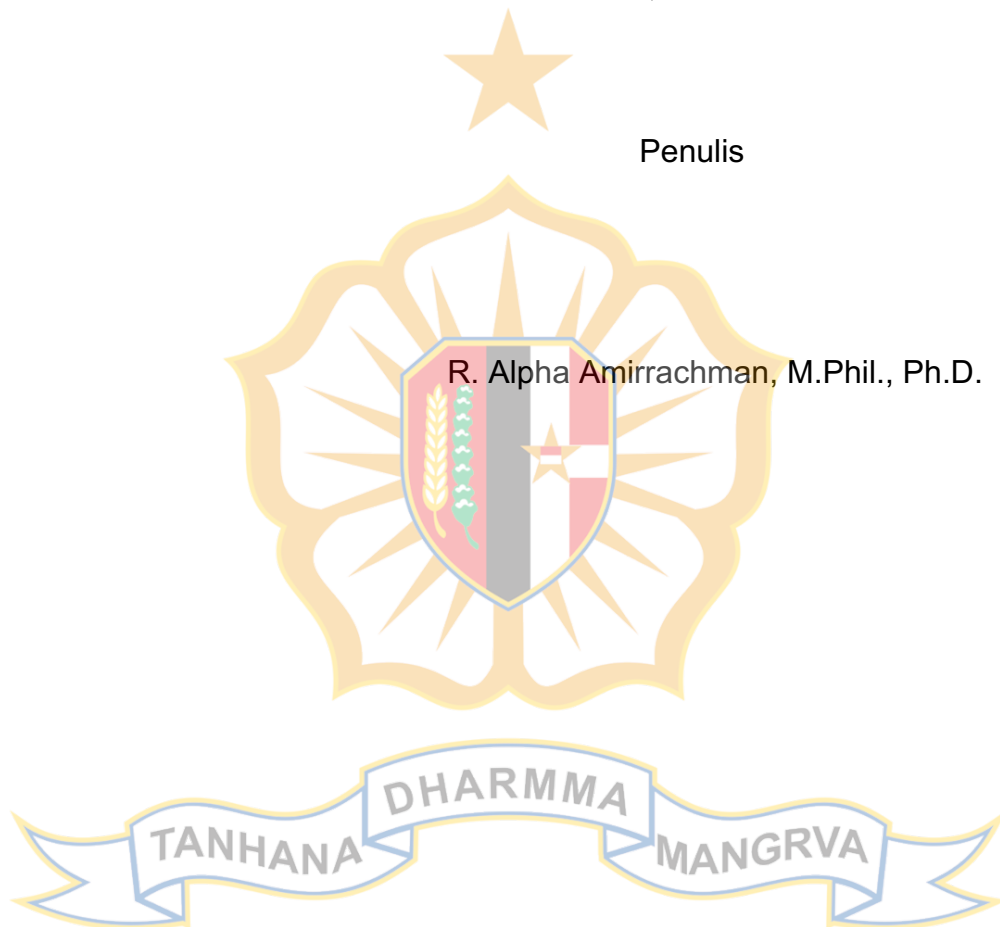
Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Jakarta, 20 Juli 2020

Penulis

R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D.



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Alpha Amirrachman, M.Phil. Ph.D.
Jabatan : Sekretaris Majelis Dikdasmen
Instansi : PP Muhammadiyah
Alamat : Jl. Menteng Raya No 62 Jakarta Pusat

sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX
tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan Taskap ini terbukti tidak
asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan
seperlunya.

Jakarta, 20 Juli 2020

Penulis Taskap

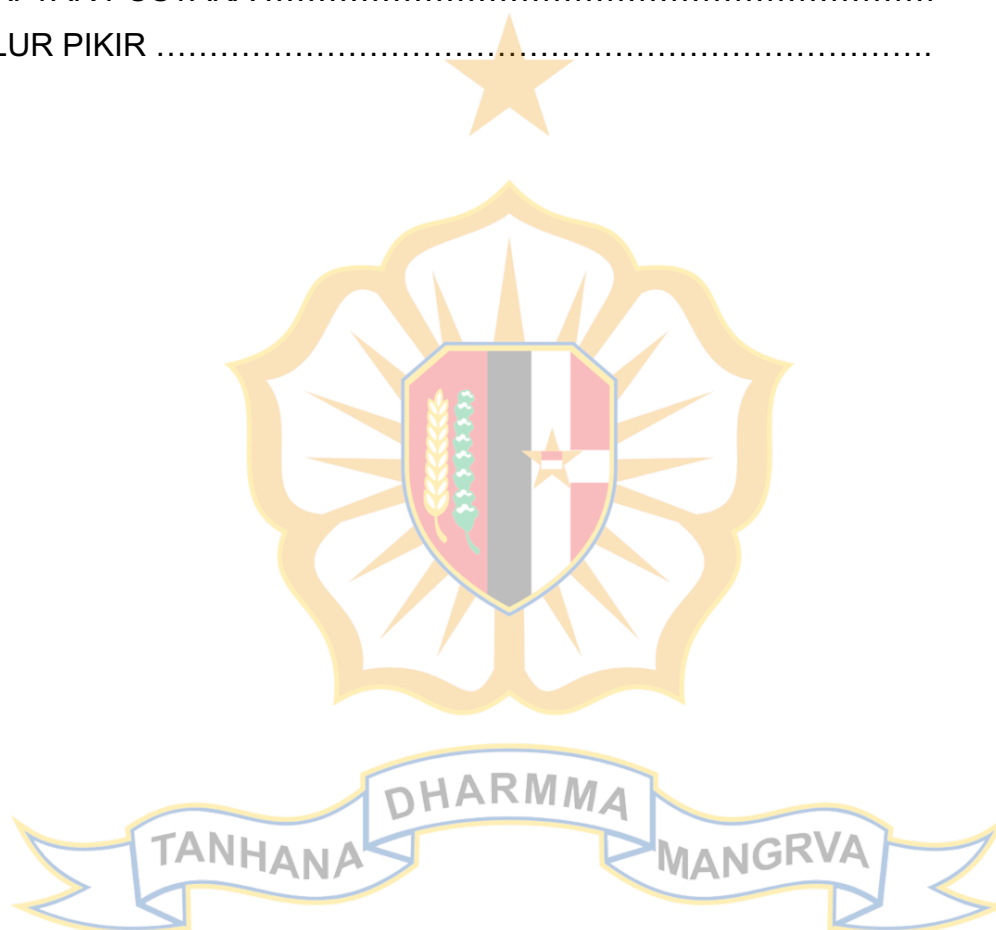
R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D.

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian dan Singkatan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-undangan	9
9. Kerangka Teoritis	13
10. Data dan Fakta	18
11. Lingkungan Strategis	29
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	35
13. Tata Kelola Penyelenggaraan Program Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) SMA dan SMK di Jawa Barat	36
14. Proses Pembelajaran pada Program PTJJ SMA dan SMK di Jawa Barat	40

15. Peraturan Perundang-undangan pada Program PTJJ SMA dan SMK di Jawa Barat	59
BAB IV KESIMPULAN	
16. Simpulan	63
17. Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	72
ALUR PIKIR	75



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. APK DI JAWA BARAT 2016-2019

GAMBAR 2. PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK

GAMBAR 3. SALAH SATU TKB DI KABUPATEN BOGOR





BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi prioritas utama periode kedua kepemimpinannya. Hal ini ditegaskan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pertama usai dilantik sebagai presiden periode 2019-2024 di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2019. Dalam pidato tersebut, Presiden terpilih ini menyampaikan bahwa SDM Indonesia harus terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya Indonesia berpotensi besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dikarenakan populasi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia tidak produktif. Kita memahami bahwa ancaman di era globalisasi tidak selalu dalam bentuk ancaman militer, tapi bisa dalam bentuk *non-traditional threat* termasuk di antaranya kuantitas penduduk yang belum dimbangi dengan kualitas SDM. Dalam hal ini penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berikhtiar meningkatkan kualitas SDM karena populasi yang besar jika tidak diimbangi dengan kualitas SDM bisa merubah potensi kekuatan ini menjadi potensi petaka demografi di mana manusia-manusia yang tidak memiliki pendidikan yang cukup bukan hanya menjadi beban tapi dapat berkontribusi pada terganggunya tatanan kehidupan dan tertib sosial masyarakat.

Presiden Joko Widodo dengan tegas menjelaskan apa yang akan beliau kerjakan untuk lima tahun ke depan bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di mana pembangunan SDM akan menjadi salah satu prioritas utama. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang mereka yang berbakat di tingkat global untuk bekerja sama dengan pemerintah. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan dengan kondisi geografis yang luas dengan disparitas ekonomi-sosial yang tinggi upaya pembangunan SDM ini membutuhkan pendekatan kreatif dan khusus untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Di

era Revolusi Industri 4.0, salah satu upaya pendekatan pembelajaran yang dianggap mampu menjawab tantangan ini adalah melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) berbasis teknologi, informasi dan komputer (TIK).

PTJJ sendiri bukanlah sesuatu yang baru di dunia pendidikan. Pada level internasional, seiring dengan meningkatnya tuntutan untuk memperluas akses pendidikan melalui PTJJ, telah dibentuk International Council for Distance Education (ICDE) di Norwegia pada 1938. Pada level regional, Asian Association of Open University (AAOU) dibentuk oleh tujuh universitas di Asia pada 1987. Di Indonesia, PTJJ lebih dikenal juga dengan sebutan 'Pendidikan Terbuka', dipopulerkan dengan keberadaan Universitas Terbuka. Seiring dengan berkembangnya PTJJ di level internasional dan regional, Pemerintah Indonesia mendirikan Universitas Terbuka pada 1984 dan juga melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan PTJJ pada jenjang sekolah menengah dengan memberikan landasan peraturan dan pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Tujuan PTJJ seperti yang diuraikan pada Permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Kemendikbud 2013), Permendikbud No 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud 2014), Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka (Kemendikbud 2014), Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang PPDB 2017/2018, yaitu pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan menengah sebagaimana tertuang pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan jabarannya serta dijelaskan pada Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan bahwa: "Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter/berbudi luhur; berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif; sehat, mandiri, percaya diri, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab."

Penyelenggaraan sekolah terbuka diharapkan dapat turut meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) melalui akses bagi masyarakat Indonesia yang terkendala oleh kondisi geografis, keterbatasan waktu, kondisi ekonomi, dan

kondisi sosial budaya, untuk mengikuti pendidikan jenjang menengah yang bermutu melalui layanan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Keinginan untuk meningkatkan APK ini jugalah yang mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan PTJJ secara masif dengan melibatkan 312 SMA Terbuka dengan 1200 Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dan 32.304 siswa dan 188 SMK PJJ dengan 1200 TKB dan 11.802 siswa yang dimulai pada tahun 2017. Program ini memberikan dua pilihan kepada peserta didik, yaitu menyiapkan mereka sebagai lulusan berkualitas untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang bukan hanya siap melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi juga siap jika memilih untuk memasuki dunia kerja baik sebagai pekerja maupun juga sebagai wirausahawan yang tangkas, terampil dan berwawasan global dan mampu bersaing secara nasional dan internasional dengan tetap teguh dengan karakter keindonesiaan.

Namun demikian data awal menunjukkan bahwa pengelolaan PTJJ di Jawa Barat belum optimal baik dari aspek tata kelola, proses pembelajaran dan dukungan peraturan perundangan. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi program di antaranya jumlah penduduk yang cukup besar dengan wilayah yang terbentang luas dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang relatif masih rendah terutama di wilayah pedesaan. Biasanya anak-anak hanya bersekolah sampai tingkat SMP saja, biasanya mereka yang lulus akan mencari pekerjaan ke kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta.

Di samping itu, saat ini penerapan PTJJ juga mendapatkan momentum dengan adanya wabah Covid-19 di mana siswa diwajibkan untuk belajar dari rumah. Menurut laporan UNESCO (2020) sebanyak 1.543.446.152 siswa atau 89% dari total siswa di 188 negara termasuk di Indonesia terpaksa tidak ke sekolah dan belajar dari rumah.¹ Seiring dengan diterapkan belajar dari rumah ini muncul keluhan dari masyarakat mengenai sulitnya ini dilaksanakan. Oleh karenanya penting untuk menganalisis pengelolaan PTJJ sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan

¹ UNESCO (2020). "Global monitoring of school closures caused by COVID-19." Diunduh 2 April, 2020, from <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>.

mengangkatnya sebagai Taskap dengan judul: Pegelolaan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, di mana PTJJ baik di luar negeri dan di dalam negeri telah berjalan, namun untuk di Indonesia PTJJ ini belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan pada implementasi PTJJ di Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi terbesar. Di sisi lain bahwa PTJJ yang diharapkan dapat dijadikan salah satu alternatif ketika negara menghadapi wabah Covid-19 dan siswa terpaksa belajar dari rumah, ini pun masih menghadapi berbagai kendala. Dengan demikian rumusan masalah adalah: Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan PTJJ di Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia? Dari rumusan masalah tersebut maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dijadikan pokok bahasan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tata kelola penyelenggaraan program Pendidikan Terbuka dan Jarak jauh (PTJJ) pada jenjang pendidikan menengah SMA dan SMK di Jawa Barat ?
- b. Bagaimana proses pembelajaran pada program PTJJ SMA dan SMK di Jawa Barat?
- c. Bagaimana dukungan peraturan dan perundangan terhadap implementasi PTJJ SMA dan SMK di Jawa Barat ?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan PTJJ di Jawa Barat.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuannya adalah sebagai subangan pemikiran kepada pemangku kebijakan tentang pengelolaan PTJJ agar dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas SDM Indonesia.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada implementasi PTJJ di Jawa Barat sebagai provinsi yang dengan massif melaksanakan program ini.. Adapun sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

a. **BAB I. LATAR BELAKANG**

Dalam Bab ini diuraikan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Bab ini juga akan memberikan gambaran mengenai implementasi PTJJ di berbagai belahan dunia termasuk di Asia Tenggara dan Indonesia dan bagaimana di era Revolusi Industri 4.0 penyelenggaraan PTJJ dapat didukung oleh teknologi.

b. **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini dibahas tentang peraturan perundang-undangan, ekosistem nasional, kerangka teoritis dan tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai landasan dalam merumuskan pemecahan persoalan berkaitan dengan upaya menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PTJJ.

c. **BAB III. PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan setiap persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan PTJJ pada jenjang SMA dan SMK saat ini di Provinsi Jawa Barat, yaitu terkait tata kelola, proses pembelajaran, fungsi guru dan tutor, output dan ketersediaan infrastruktur. Kemudian dengan menggunakan landasan teori yang ada, akan dianalisis dan dirumuskan sejumlah usulan kebijakan dan strategi terkait optimalisasi penyelenggaraan PTJJ baik di tingkat provinsi maupun nasional.

d. **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan baik untuk memperkaya teori-teori sebelumnya maupun untuk memberikan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. **Metode dan Pendekatan**

- a. **Metode** yang digunakan dalam penulisan Kertas Karya Perseorangan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskripsi analisis. Proses pencarian dan pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai tulisan akademis berupa arsip, artikel ilmiah baik *on-line* maupun *off-line* dan buku-buku yang menjelaskan tentang pendapat, teori, dalil-dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan. Juga wawancara dengan pihak terkait.
- b. **Pendekatan** yang digunakan adalah perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. **Pengertian dan Singkatan**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **asynchronous**: komunikasi *on-line* tidak langsung
- b. **collaborative work**: pekerjaan atau aktivitas yang kolaboratif
- c. **consistent delivery**: pemberian materi pembelajaran yang konsisten
- d. **integrating audio, video and animation**: audio, video and animasi yang terintegrasi
- e. **personalized**: lebih bersifat pribadi
- f. **self-paced program**: kecepatan program yang dapat disesuaikan

- g. **synchronous:** komunikasi *on-line* langsung
- h. **tactical advantages:** keuntungan taktis, dalam hal ini fleksibilitas untuk belajar di mana saja dan kapan saja
- i. **training delivery advantages:** manfaat penyelenggaraan pelatihan/pembelaaran

Adapun singkatan sebagai berikut:

- a. **AAOU:** Asian Association of Open University
- b. **ADLA:** Africal Distanbce Education Association
- c. **APK:** Angka Partisipasi Kasar
- d. **ASEAN:** Association of Southeast Asian Nations
- e. **CADE:** Canadian Association for Distance Education
- f. **CDE:** Council for Distance Education
- g. **DUDI:** Dunia Industri
- h. **EADTU:** European Association of Distance Teaching Universities
- i. **IPM:** Indeks Pembangunan Manusia
- j. **LMS:** Learning Management System
- k. **MPLS:** Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
- l. **OECD:** Organisation for Economic Co-operation and Development
- m. **OCL:** Commonwealth of Learning
- n. **PJ:** Penanggung Jawab
- o. **PJJ:** Pendidikan Jarak Jauh
- p. **PKBM:** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- q. **PTJJ:** Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh
- r. **PTK:** Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- s. **SEAMEO:** Southeast Asian Minsiters of Education Organization
- t. **SEAMOLEC:** Southeast Asian Ministers of Education Organizations Regional Open Learning Center
- u. **SNP:** Standar Nasional Pendidikan
- v. **TIK:** Teknologi Informasi Komunikasi
- w. **TKB:** Tempat Kegiatan Belajar
- x. **USDLA:** United States Distance Education

- y. **UNESCO:** United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations
- z. **UNICEF:** United Nations Children's Fund





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

PTJJ yang diselenggarakan secara masif di Provinsi Jawa Barat perlu dianalisis dari aspek tata kelola, proses pembelajaran dan pertauran perundangan. Terlebih pada era 4.0 dan saat ini tengah wabah Covid-19, ternyata pelaksanaan aktivitas secara jarak jauh menjadi momentum bukan hanya di dunia pendidikan, juga di dunia pekerjaan lainnya di mana pertemuan-pertemuan penting dari berbagai kalangan masyarakat dan profesional dilaksanakan secara virtual. Untuk itu diperlukan kajian untuk melihat seberapa memadai regulasi yang menjadi landasan hukum saat ini. Selain itu, diperlukan sejumlah tinjauan pustaka menyangkut teori serta data dan fakta yang berkaitan dengan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTJJ.

8. Peraturan Perundang-undangan

a. UUD 1945 NRI 1945

Peraturan perundang-undangan meliputi tujuan nasional yang termaktub di Pembukaan UUD 1945 serta berbagai turunannya. Bunyi alenia keempat pembukaan UUD 1945 sebagai berikut; “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

b. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional “berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Jelas bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui pendidikan yang merata dan berkualitas adalah salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia. Secara lebih khusus, UU No 20 Tahun 2003 (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional “berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3). Namun dengan negara luas seperti Indonesia, selalu ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan karena tidak bisa terjangkau oleh sentuhan pemerintah pusat dengan cara biasa. Karena itu salah satu tujuan dari pelaksanaan PTJJ adalah untuk meningkatkan akses pendidikan sebagaimana diuraikan pada kerangka teoritis di bawah ini.

c. Permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

Dalam Pasal 1, disebutkan bahwa pendidikan layanan khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil,

dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi; satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain; sekolah kecil adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang; sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri (Kemendikbud 2013).

d. Permendikbud No 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada Pasal 1 disebutkan bahwa: Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran; Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan jarak jauh; Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu; Belajar tuntas adalah suatu sistem belajar yang mengutamakan tingkat penguasaan pada level kompetensi tertentu bagi setiap peserta didik; Bantuan belajar adalah segala

bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademis dan administrasi, maupun pribadi secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Tutor adalah pendidik memberikan bantuan belajar kepada peserta didik; Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan, baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut TKB adalah bagian dari satuan pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran; Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri (Kemendikbud 2014).

e. Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kemendikbud 2014

Pedoman ini memuat Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Nomor 1670/D/LK/2014 tentang Pelaksanaan Sekolah Terbuka pada Jenjang Pendidikan Menengah. Disebutkan bahwa sekolah terdapat pada jenjang pendidikan menengah yang dimaksud dalam Perdirjen ini adalah sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menyelenggarakan SMA Terbuka dan SMK Terbuka. Sekolah menengah terbuka ini adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah menengah atas induk dengan menggunakan metode belajar mandiri, terbuka dan jarak jauh. Tujuan penyelenggaraan sekolah terbuka pada jenjang pendidikan menengah adalah memberikan layanan pendidikan melalui perluasan akses bagi masyarakat Indonesia yang terkendala oleh: kondisi geografis; keterbatasan waktu; kondisi ekonomi; dan kondisi sosial-budaya,

sehingga dapat memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan jenjang menengah yang bermutu (Kemendikbud 2014).

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

g. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 16 Tahun 2017 tentang PPDB 2017/2018

Bagian I Pasal 1 butir 10 yang menyatakan bahwa PTJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidik/pembelajaran (Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2017).

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Manajemen

Dari sisi manajemen atau tata kelola, ada empat fungsi yang menjadi rujukan: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *leading* (memimpin), dan *controlling* (pengawasan). Perencanaan adalah mengidentifikasi tujuan dari performa organisasi dan memutuskan tugas-tugas dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada untuk mencapainya. Perorganisasian merefleksikan bagaimana sebuah organisasi mencapa mencapai apa

yang direncanakan, ini melibatkan pemberian tugas-tugas, mengelompokkan tugas-tugas ke dalam beberapa bagian, mendelegasikan kewenangan, dan mengalokasikan berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan dari organisasi. Memimpin adalah memanfaatkan pengaruh untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Memimpin artinya menciptakan budaya dan nilai bersama, mengkomunikasikan tujuan-tujuan kepada karyawan melalui organisasi, dan mendorong karyawan dengan keinginan untuk memiliki performa yang tinggi. Pengawasan adalah memonitor kegiatan pada karyawan, memastikan apakah organisasi berada pada target untuk mencapai sasaran, dan membuat koreksi yang diperlukan (Daft 2010, 5-7).² Teori ini dapat diterapkan dalam kajian ini untuk melihat aspek tata kelola dalam sebuah organisasi dalam hal ini pada level nasional adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara pada level lokal adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sekolah atau satuan pendidikan.

b. Teori Perkembangan Model

PTJJ telah menggunakan secara intensif teknologi media, mulai dari teknologi cetak dalam bentuk korespondensi hingga digital. Yang pertama adalah model koresponden. Pendekatan ini diasosiasikan dengan inisiatif pendidikan jarak jauh modern pada tahun 1970an. Dengan mengirim siswa material cetak melalui pos, guru-guru berusaha memecahkan masalah terkait komitmen waktu, jarak geografis, dan kecepatan belajar yang diharapkan. Kerugian dari pendekatan ini adalah tidak adanya interaksi langsung antara guru dan siswa. Yang kedua adalah model multimedia. Pada tahun 1970an, 1980an, kombinasi dari cetak, audio-visual, metode yang dibantu computer dikembangkan. Ini memperkaya pengalaman belajar, walaupun interaksi langsung dengan guru terbatas pada pos dan telepon. Yang ketiga model tele-learning. Model ini melibatkan

² Daft, R. L. (2010). Management. Mason, South-Western Cengage Learning.

interaksi *synchronous* (misalnya melalui audio/video-conferencing) antara guru dan siswa dari jarak jauh. Dalam bentuk aslinya, pendekatan ini mengkombinasikan media audio-visual dengan konferensi via telepon, walaupun kehilangan fleksibilitas terkait waktu, tempat dan kecepatan. Yang keempat adalah model pembelajaran fleksibel. Model-model sebelumnya dikombinasikan ke dalam model ini dengan dukungan internet dan World Wide Web (WWW). Interaksi guru-siswa dan siswa-siswa dapat diciptakan dengan metode termasuk email dan konferensi *on-line* secara *synchronous* dan *asynchronous*. Berbagai solusi untuk memecahkan masalah waktu, tempat dan kecepatan dapat diimplementasikan tanpa kehilangan keuntungan dari interaksi *synchronous*. Yang kelima adalah model pembelajaran fleksibel yang pintar. Satu-satunya perbedaan dengan model-model sebelumnya adalah penggunaan teknologi *on-line* termasuk database dan sistem respon otomatis untuk menekan biaya administrasi pembelajaran (Kusmawan dan Belawati 2010, h. 26-27).³

Sebagaimana dielaborasi oleh Perraton (2012), pengajaran jarak jauh telah berkembang lebih pesat lagi dalam beberapa tahun terakhir. Ada empat alasan yang mendorong penggunaan sistem jarak jauh ini. Yang *pertama* adanya kepedulian untuk meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh akses pendidikan. Yang *kedua*, terutama di negara maju seperti AS, besarnya jumlah siswa di kelas yang mempelajari mata-mata pelajaran yang tidak relevan atau kurang dibutuhkan mendorong adanya pembelajaran yang lebih *individualized*. Keempat, terutama di negara berkembang, untuk memberikan lebih banyak sumber belajar ke lebih banyak orang, atau untuk memanfaatkan secara ekonomis di tengah sedikitnya ketersediaan sumber belajar. Keempat, membuka kesempatan yang lebih luas bukan hanya bagi siswa dengan apapun latar belakangnya,

³ Kusmawan, U. and T. Belawati (2010). "The role of ICT in open and distance education partnership." *Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning* IV: 24-36.

tapi juga membuka sistem pengajarannya bagi siapa saja yang ingin melihatnya (h. 18-19).⁴

c. Teori Pemanfaatan TIK

Terkait pemanfaatan TIK untuk mendukung PTJJ, Lubin (2013) menggambarkan betapa derasnya produktivitas manusia dalam menggunakan internet. Michael Allen (2016) menguraikan beberapa keuntungan dari PTJJ yang didukung oleh TIK: *tactical advantages* (keuntungan taktis) yaitu fleksibilitas untuk belajar di mana saja dan kapan saja; mereduksi biaya perjalanan; media untuk melacak, meng-update dan mengatur pembelajaran. Berikutnya *training delivery advantages* (keuntungan penyelenggaraan pelatihan/pembelajaran) yaitu *consistent delivery* (pemberian materi yang konsisten); pembelajaran yang lebih *personalized*; konten grafik dan animasi yang interaktif; material yang bisa disesuaikan; *self-paced programs* (kecepatan program dapat disesuaikan).⁵

Perkembangan teknologi internet dan multimedia yang begitu cepat dari waktu ke waktu telah merubah cara kita melakukan aktivitas kita. Hari ini adalah era *e-learning*, *on-line learning*, multimedia (*integrating audio, video and animation*), *multiple sensory stimulation*, *collaborative work* dan *information exchange*. Karena itu penerapan model pembelajaran kooperatif di kelas virtual yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi multimedia dan internet. Siswa diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok dalam kelas virtual dan mereka dapat belajar dalam sebuah lingkungan yang kaya, berinteraksi dengan anggota kelompok dan guru, memberikan dukungan pada anggota kelompok dan saling

⁴ Perraton, H. (2012). *Theory, evidence and practice in open and distance learning*. Oldenburg, BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

⁵ Allen, M. W. (2016). *Guide to e-learning*. New Jersey, John Wiley & Sons.

bertukar informasi, dalam sebuah sistem pembelajaran jarak jauh berbasis *on-line* (Krishartomo 2011, h. 43).⁶

Hari ini teknologi internet dan multimedia telah memberikan kemampuan kepada siswa dan guru untuk melakukan interaksi dan pertukaran informasi yang efektif melalui aktivitas pembelajaran kooperatif. Siswa akan memiliki kemampuan untuk membagi dan mengkomunikasikan materi-materi pembelajaran multimedia tertentu yang kaya (misalnya terdiri dari gambar, audio, video, animasi), dokumen digital, file presentasi software and multimedia dengan anggota kelompok ataupun guru dengan cepat, efektif dan efisien. Penggunaan teknologi multimedia dan internet telah membuka peluang kesempatan untuk memperbaiki aktivitas pembelajaran kolaboratif. Kita dapat mengembangkan material e-learning dan software aplikasi di dalam web dan database server untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi siswa (Krishartomo 2011, 43-44).⁷

Sebagaimana diuraikan oleh Krishartomo (2011), dalam proses pembelajaran pun PTJJ tidak menutup kemungkinan diadakannya pembelajaran kolaboratif antar siswa walaupun mereka tidak berada di satu tempat. Pembelajaran kooperatif merupakan cara yang efektif dan menarik untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa dibagi atau mengorganisasikan diri ke dalam kelompok-kelompok kecil, di dalamnya ada siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda, lalu menggunakan berbagai aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman terhadap mata pelajaran. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab bukan hanya untuk mempelajari apa yang diajarkan, namun juga untuk menolong anggota lainnya untuk belajar, karena itu menciptakan lingkungan dengan semangat pencapaian. Siswa menyelesaikan

⁶ Krishartomo, T. (2011). "Using internet and multimedia technology to develop an integrated e-learning media than can guide, facilitate and improve rthe quality of cooperative learning activities." V: 41-73.

⁷ Ibid.

tugas sampai seluruh anggota kelompok betul-betul memahami dan menyelesaikannya. Siswa yang memiliki kesempatan untuk bekerja secara kolaboratif belajar lebih cepat dan lebih efisien serta memiliki sikap positif terhadap pengalaman belajar.⁸

10. Data dan Fakta

PTJJ terus berkembang seiring dengan terbentuknya asosiasi-asosiasi pada level internasional maupun regional. Pada level internasional, seiring dengan meningkatnya tuntutan untuk memperluas akses pendidikan melalui PTJJ, telah dibentuk International Council for Distance Education (ICDE) di Norwegia pada 1938. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations (UNESCO) sejak dibentuk pada 1945 juga telah memberikan perhatian pada PTJJ melalui berbagai kegiatan teknis, pengaturan standar, poyek inovatif, peningkatan kapasitas dan jejaring. Commonwealth of Learning (OCL) juga dibentuk pada 1989 untuk mendorong pengembangan pengetahuan, sumber belajar dan teknologi PTJJ. OCL beserta jejaringnya telah membantu 53 negara-negara persemakmuran seperti Inggris, Australia dan negara lainnya untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan melalui PTJJ (Kusmawan dan Belawati 2010).⁹

Tantangan dunia pendidikan di Asia yang mendorong semakin berkembangnya PTJJ adalah yang pertama kebutuhan pendidikan di dunia dan di region. Sebagaimana dilaporkan oleh International Council on Open and Distance Education (ICDE), Asia, sebagai region dengan jumlah penduduk terbesar, perlu memberikan respon terhadap apa yang dibutuhkan dunia pendidikan secara global. Isu-isu itu berkisar pada *access*, *equity* dan *quality learning outcomes*. Yang kedua adalah berubahnya dengan cepat lingkungan pekerjaan, berubahnya persyaratan keterampilan yang dibutuhkan industri dan kebutuhan akan adanya hubungan yang erat antara akademik dan industri. Yang ketiga adalah mobilitas siswa antar-negara di Asia terutama pada level perguruan

⁸ Ibid.

⁹ Kusmawan, U. and T. Belawati (2010). "The role of ICT in open and distance education partnership." *Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning* IV: 24-36.

tinggi. Yang keempat adalah redefinisi keterampilan abad ke-21. Pendalaman terhadap keterampilan ini menunjukkan bahwa perlu menyertakan nilai etis, *digital citizenship* (kewarganegaraan digital), pembelajaran independen, rasa tanggung jawab, manajemen waktu yang efektif dan pembelajaran yang terintegrasi. Yang keenam, kesetaraan akses dan hasil atau luaran pembelajaran (*learning outcomes*). Setiap siswa perlu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar apa yang diajarkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh adalah tanggung jawab sosial. Institusi pendidikan perlu mempraktikkan tanggung jawab sosial bukan hanya kepada pemangku kepentingan langsung yaitu siswa dan orang tua tapi juga kepada komunitas di mana mereka berada. Yang kedelapan adalah sumbangsih kepada *sustainable development goals* (SDGs) dengan memasukkannya ke dalam kurikulum (Bandalaria 2018).¹⁰

Pada level regional, Asian Association of Open University (AAOU) dibentuk oleh tujuh universitas di Asia pada 1987. Organisasi yang serupa juga didirikan seperti African Distance Education Association (ADLA), Canadian Association for Distance Education (CADE), European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), Open and Distance Education of Australia (EADTU), United States Distance Education (USDLE). Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) yang didirikan pada 1965 juga membentuk Southeast Asian Ministers of Education Organizations Regional Open Learning Center (SEAMOLEC) yang memberikan perhatian pada pengembangan PTJJ di Asia Tenggara termasuk di Indonesia (Kusmawan dan Belawati 2010).¹¹

Di negara-negara ASEAN, pendidikan berbasis TIK juga berkembang pesat. Di Brunei Darussalam, misalnya, program, e-Education, terdiri dari Edunet, e-Learning, Education Information System, Digital Library, dan Human Capacity Building. Salah satu pilar program tersebut, e-Education, merupakan sebuah sistem yang secara langsung membantu terselenggaranya konsep teknologi yang tepat untuk memperkaya dimensi baru pada lingkungan pelajaran dan

¹⁰ Bandalaria, M. d. P. (2018). "Open and distance elearning in Asia: Country initiatives and instructional cooperation for the transformation of higher education in the region." *Journal of learning for development* 5(2): 116-132.

¹¹ Kusmawan, U. and T. Belawati (2010). "The role of ICT in open and distance education partnership." *Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning* IV: 24-36.

pengajaran. E-Learning didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk memperkaya lingkungan pembelajaran melalui sebuah Learning Management System (LMS). Guru dapat mengunggah materi pengajaran mereka ke siswa. Aktivitas siswa mencatat dalam kelas konvensional akan digantikan dengan diskusi yang lebih interaktif. Menggunakan asesmen dan penilaian secara *on-line*, level pemahaman siswa dapat dimonitor dan disesuaikan secara cepat. Pada intinya kebijakan ini meningkatkan kolaborasi dan interaksi antara guru dan siswa (Akbar 2010, h. 7).¹²

Di Vietnam, sebagian besar kota dan provinsi telah menyelenggarakan pembangunan teknologi digital di universitas-universitas dan sekolah-sekolah. Sebagian besar sekolah dan rumah-rumah sakit saling terhubung dengan internet. Enam belas perguruan tinggi menyediakan layanan PTJJ, program terbesarnya dimiliki oleh National University of Ho Chi Minh City dengan lebih dari 10.000 mahasiswa. National University Hanoi juga merupakan institusi pendidikan terkemuka yang menyediakan e-learning. Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Vietnam juga menyediakan platform untuk saling berbagi antara institusi pendidikan, guru dan siswa. Sejak 2007, dengan dukungan Vietnam Education Foundation dari AS dan Massachusetts Institute of Technology, sebuah portal bernama Vietnam Open Course Ware mulai beroperasi, menyediakan kursus-kursus *on-line* secara gratis bagi siswa sekolah dan masyarakat luas. Beberapa perusahaan swasta juga berpartisipasi menyediakan layanan *e-learning* bagi sekolah dasar dan menengah (Que dan Vuong 2010, h. 93-95).¹³

Di Kamboja, Open Schools Program telah merubah peta pembangunan TIK di negara tersebut. Melalui program ini, Kementerian Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kamboja telah mengembangkan Master Plan for ICT in Education yang akan memastikan pengembangan TIK yang efisien dan harmonis untuk pendidikan dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai bagian dari OSP, pemerintah juga memulai Open Learning Program, sebagai sebuah inisiasi untuk

¹² Akbar, D. H. K. b. H. (2010). "The development of information and communication technology in education in Brunei Darussalam." *Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning* IV: 1-15.

¹³ Que, P. V. and T. D. Vuong (2010). "ICT-based education for development: The case of Vietnam." *Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning* IV: 86-99.

menghilangkan rintangan dalam pengembangan dan implementasi pendidikan terbuka dan jarak jauh di negeri tersebut. Open Learning Program telah dialihbahasakan ke Bahasa Khmer dan diadaptasi ke budaya Kamboja. Program ini telah mengembangkan dan menyelenggarakan berbagai kursus dan program pelatihan melalui *e-learning* (Sethy 2010, h. 101).¹⁴

Di Indonesia, PTJJ dikenal lebih dikenal dengan sebutan “pendidikan terbuka”, walaupun tetap memiliki aspek “pendidikan jarak jauh”. Seiring dengan berkembangnya PTJJ di level internasional dan regional, Pemerintah Indonesia sudah mendirikan Universitas Terbuka pada 1984. Pada awalnya pembelajaran diberikan dalam bentuk modul cetak yang dikirim ke mahasiswa dan tutorial diadakan secara konvensional. Dengan semakin berkembangnya TIK, sebagian besar layanan ini diselenggarakan secara digital. Pada awalnya masih banyak mahasiswa yang belum menggunakan fasilitas ini secara optimal. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan UT *on-line* service masih rendah dan implementasi dari tutorial *on-line* juga masih belum maksimal. Dalam penelitian yang lain disebutkan bahwa partisipasi mahasiswa dan dosen semakin meningkat dan penyelenggaraan pendidikan terbuka semakin fleksibel dengan penggunaan TIK (Adji, Sunarsih et al. 2011, h. 21-40).¹⁵

Tidak hanya universitas negeri, universitas-universitas swasta berbasis e-learning pun berkembang. Salah satunya yang saat ini berkembang pesat adalah Universitas Bina Nusantara, yang awalnya didirikan sebagai sebuah lembaga kursus komputer pada tahun 1974 dengan nama Modern Computer Course, berkembang menjadi Akademi Teknik Komputer pada 1981 dan menjadi Amik Bina Nusantara pada 1986 lalu menjadi Binus University pada 1998 yang hingga saat ini dikenal dengan terobosan-terobosan pembelajaran berbasis digital (BINUS 2020). Selain itu juga berdiri Universitas Multimedia Nusantara pada 2006 yang didirikan oleh Kelompok Kompas Gramedia dengan fokus utama pada bidang TIK (UMN 2020). Walaupun tidak secara khusus mendedikasikan diri pada

¹⁴ Sethy, O. (2010). "Open and distance education in Cambodia." *Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning* IV: 100-124.

¹⁵ Adji, S. S., et al. (2011). "The use of e-learning in distance education: Online tutorial in Faculty of Education and Teacher Training Universitas Terbuka." *Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning* V: 21-40.

PTJJ, namun terobosan-terobosan yang mereka lakukan turut memberikan pengaruh dan kontribusi pada perkembangan PTJJ yang saat ini diselenggarakan dengan berbasis pada TIK karena sebagian perkuliahan mereka juga telah diselenggarakan secara *on-line*, dengan demikian memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam proses belajar. Bahkan saat ini, pemerintah mendorong agar seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menerapkan pendidikan jarak jauh paling tidak secara *blended learning* (kombinasi *on-line* dan *off-line*) berbasis TIK agar bisa memberikan banyak kemudahan bagi mahasiswa sebagaimana diatur pada UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Panen 2016).¹⁶

Bukan hanya pada level perguruan tinggi, PTJJ pun dikembangkan pada level pendidikan menengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan PTJJ pada jenjang sekolah menengah dengan memberikan landasan peraturan dan pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh dan juga dalam batas-batas tertentu sudah melakukan implementasi program ini yang dapat dijadikan rujukan untuk melaksanakan prioritas utama pemerintah dalam membangun SDM. Tujuan PTJJ seperti yang diuraikan pada Pedoman Pelaksanaan Sekolah Terbuka Pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Permendikbud Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus yaitu pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan menengah sebagaimana tertuang pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan jabarannya serta dijelaskan pada Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan bahwa: "Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkarakter/berbudi luhur; berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; sehat, mandiri, dan percaya diri; dan toleransi, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab."

PTJJ diselenggarakan sedemikian rupa sehingga memberikan dua pilihan kepada peserta didik, yaitu menyiapkan lulusannya melanjutkan ke Pendidikan tinggi atau menyiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja. Untuk itu, PTJJ

¹⁶ Panen, P. (2016). Kebijakan pendidikan jarak jauh dan e-learning di Indonesia. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang siap melanjutkan ke perguruan tinggi dan/atau siap memasuki dunia kerja yang relevan, baik sebagai pekerja maupun sebagai wirausahawan yang terampil, luwes dan berwawasan luas serta melek teknologi, serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional dengan tetap menjunjung tinggi keunggulan lokal berjati diri Indonesia (Kemendikbud 2014). Dikemukakan juga bahwa tujuan penyelenggaraan PTJJ adalah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) melalui akses bagi masyarakat Indonesia yang terkendala oleh kondisi geografis, keterbatasan waktu, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial budaya, untuk mengikuti pendidikan jenjang menengah yang berkualitas melalui layanan terbuka dan sistem belajar jarak jauh (Kemendikbud 2014).

Penelitian ini memberikan titik fokus pada implementasi PTJJ, khususnya program SMA Terbuka dan SMK Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), di Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar (45,340,8 juta), Jawa Barat dihadapkan pada tantangan yang juga besar dalam pembangunan pendidikan. Jumlah sekolah di Provinsi Jawa Barat adalah 41.311 sekolah dengan porsi 39% (25.033) sekolah swasta dan 61% (16.278) sekolah negeri. Jumlah seluruh guru di Jawa Barat sebanyak 417.693 baik pada sekolah negeri maupun swasta. Dengan potensi yang begitu besar, pembangunan pendidikan di Jawa Barat memberikan kontribusi 1/5 dari pembangunan manusia Indonesia melalui sektor pendidikan. Dengan demikian perlu perhatian sangat serius untuk menjadikan SDM Jawa Barat unggul dan kompetitif, melalui pembangunan pendidikan berkelanjutan (Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013).

Pendidikan di Jawa Barat dihadapkan pada permasalahan yang tidak ringan. Menurut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2013-2018 disebutkan beberapa permasalahan pendidikan Jawa Barat, pertama, Angka Partisipasi Kasar (APK) Jawa Barat masih di bawah rata-rata APK Nasional. Kedua, angka putus sekolah yang didominasi anak usia 16 – 18 tahun masih tinggi. Ketiga, anak usia sekolah yang bekerja. Keempat, aksesibilitas terhadap sekolah belum merata di beberapa wilayah. Kelima, ruang kelas untuk siswa SMP dan SMA 'di beberapa wilayah masih terbatas dan rusak serta ruang lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan. Keenam, kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan

tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing. Ketujuh, biaya pendidikan menengah dan tinggi mahal. Kedelapan, masih sedikitnya daya tampung lulusan SD/MI ke SMP/MTs begitu juga di SMA/MA/SMK (Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013). Pemerintah Provinsi Jawa Barat berketetapan mengambil kebijakan penerapan PTJJ di seluruh provinsi dengan landasan peraturan sebagaimana diuraikan di atas untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Ketika program ini akan dimulai, Provinsi Jawa Barat masih belum berhasil dalam hal pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) sesuai dengan yang diharapkan. Data tahun 2015-2016 capaian APK pendidikan menengah Provinsi Jawa Barat 76% memiliki kesenjangan 10% dari target pencapaian yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan masih adanya 247.067 peserta didik yang tidak melanjutkan ke tingkat sekolah menengah. Pada tahun 2014-2015, terdapat 703.747 lulusan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), sedangkan daya tampung sekolah menengah hanya untuk 469.567 peserta didik. Dengan demikian terdapat kesenjangan sebanyak 2234.180 peserta didik yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan menengah. Di samping karena faktor fisik sekolah menengah di Jawa Barat yang tidak memiliki daya tampung sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ada dua faktor yang menyebabkan APK sekolah menengah masih rendah, dan yang menjadi kendala dalam menjangkau layanan pendidikan menengah. Pertama, dari sisi ekonomi, rendahnya status ekonomi orang tua. Kedua dari segi geografis, yaitu jauh dan terpencilnya tempat tinggal peserta didik (Thaib 2018).¹⁷

Program PTJJ dalam bentuk SMA Terbuka dan SMK PJJ ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, keselaraasan dan kepastian mendapatkan layanan pendidikan serta mengejar APK di tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan data yang ada, jumlah remaja usia-16-21 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan sekolah menengah cukup tinggi. APK sekolah menengah di Jawa Barat baru mencapai 76,6%, yang merupakan terendah kedua se-Indonesia setelah Provinsi Papua. APK yang rendah ini diharapkan mampu meningkat hingga mencapai angka 90,8% pada tahun 2018. Program ini dilaksanakan mulai tahun ajaran 2017/2018

¹⁷ Thaib, D. (2019). Studi evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

di berbagai wilayah di seluruh penjuru Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, SMA Terbuka dan SMK PJJ Jawa Barat dilaksanakan di sekolah yang menjadi Sekolah Induk di masing-masing kecamatan. Program ini tidak membebankan biaya apapun ke siswa semua dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dijelaskan juga bahwa tujuan penyelenggaraan SMA Terbuka dan SMK PJJ adalah untuk meningkatkan APK melalui akses bagi masyarakat Indonesia yang terkendala oleh kondisi geografis, keterbatasan waktu, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial budaya.

Untuk SMA Terbuka diikuti 312 sekolah dengan 32.304 siswa dan 1200 TKB. Untuk SMK PJJ, diikuti 188 sekolah dengan 11.802 siswa dan 1200 TKB. Persyaratan untuk mengikuti program ini adalah usia maksimum 21 tahun pada saat masuk. Khusus untuk SMK PJJ Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Kamar Dagang Industri dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, melalui magang, namun sebagian besar masih di sektor informal (Fazhar Restu, wawancara, 10 Juni 2020).¹⁸ Program ini memberikan dua pilihan kepada peserta didik, yaitu menyiapkan mereka sebagai lulusan berkualitas untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang bukan hanya siap melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi juga siap jika memilih untuk memasuki dunia kerja baik sebagai pekerja maupun juga sebagai wirausahawan yang tangkas, terampil dan berwawasan global dan mampu bersaing secara nasional dan internasional dengan tetap teguh dengan karakter keindonesiaan. Khusus mengenai SMA Terbuka, walaupun masukan peserta didik dan proses pembelajarannya berbeda dengan SMA regular, namun lulusannya diharapkan memiliki kompetensi lulusan yang sama dengan lulusan SMA regular. Namun dalam perjalanannya ikhtiar ini banyak mendapatkan tantangan (Latip 2017, Thaib 2019).¹⁹²⁰

Menurut Latip (2017), banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini mengingat jumlah penduduk yang cukup besar dengan

¹⁸ Fazhar Restu, Manajer Jaringan, SEAMOLEC, wawancara 10 Juni 2020.

¹⁹ Latip, A. (2017). Tantangan SMA Terbuka di Jawa Barat. Kompasiana.

²⁰ Thaib, D. (2019). Studi evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

wilayah yang terbentang luas. Menurut Latip, tantangan utama yaitu kesadaran masyarakat dan kondisi geografis. Sementara tantangan ketiga adalah minimnya sarana prasarana teknologi (Fazhar Restu, wawancara, 10 Juni 2020).²¹ Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan memang menjadi kendala bagi kemajuan pendidikan di provinsi ini, tidak terkecuali penerapan program SMA Terbuka. Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi terutama di sebagian besar wilayah pedesaan masih rendah. Pada umumnya anak-anak hanya bersekolah sampai tingkat SMP saja, biasanya mereka yang lulus akan mencari pekerjaan ke kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta.²²

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan, di mana anggota lingkungannya tidak bersekolah dan sudah bekerja karena tuntutan orang tua untuk mencari penghasilan. Ini juga yang menyebabkan nyaris rendahnya respon masyarakat pedesaan terutama terhadap program SMA Terbuka. Nampaknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang berhasil meyakinkan masyarakat bahwa program SMA Terbuka memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Khusus untuk SMK PJJ, antusiasme masyarakat lumayan baik karena adanya harapan yang tinggi untuk dapat langsung atau melanjutkan bekerja.

Yang kedua adalah kondisi geografis di mana kontur wilayah sangat beragam dari mulai pegunungan, pesisir dan daratan dengan medan yang terjal dan seringkali melewati gunung dan sungai untuk mencapainya. Kondisi ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengikuti program ini. Ketika SMA Terbuka berlokasi di satu kecamatan, maka mereka yang bertempat tinggal jauh maka akan kesulitan untuk mencapainya. Yang ketiga adalah minimnya perangkat teknologi yang memadai untuk mengatasi persoalan jarak sehingga membuat peserta didik menggunakan modul atau memilih tidak bersekolah sama sekali (Fazhar Restu, wawancara, 10 Juni 2020).²³

²¹ Fazhar Restu, Manajer Jaringan, SEAMOLEC, wawancara 10 Juni 2020.

²² Latip, A. (2017). Tantangan SMA Terbuka di Jawa Barat. [Kompasiana](#).

²³ Fazhar Restu, Manajer Jaringan, SEAMOLEC, wawancara 10 Juni 2020.

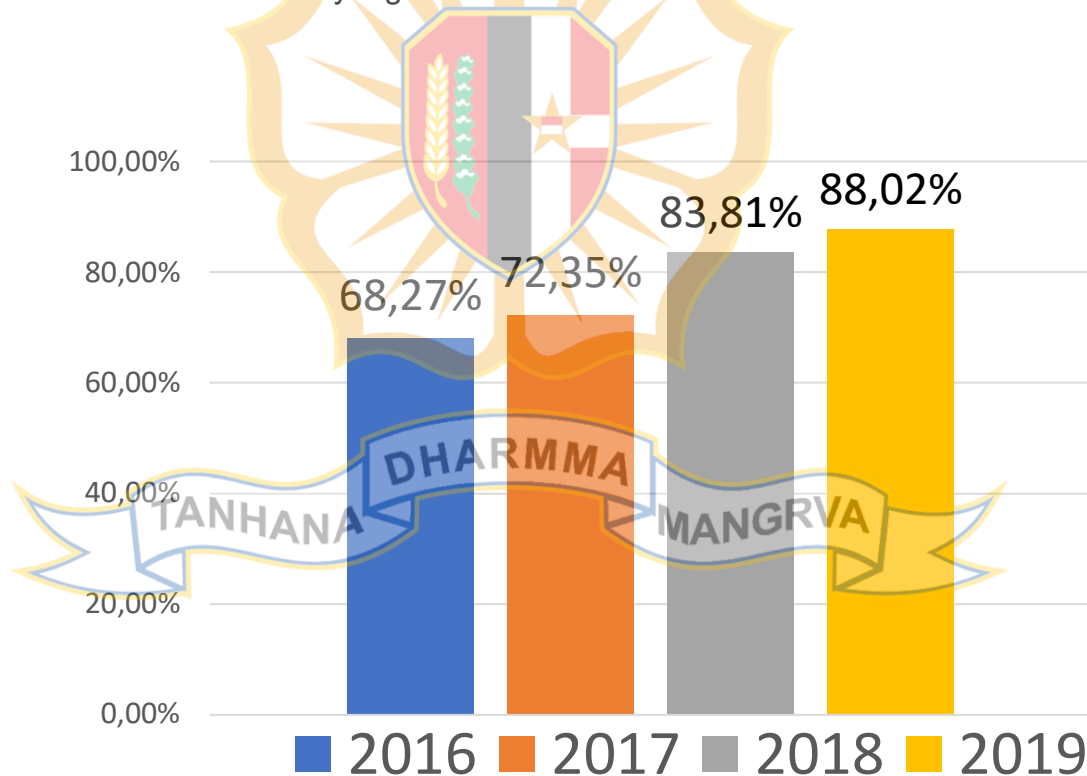
Pemerintah Jawa Barat pada 2016 telah melakukan rintisan implementasi SMK PJJ pada 2016 lebih diperluas pada tahun berikutnya pada wilayah wilayahkabupaten/kota di Jawa Barat. Pada tahun 2017 dari 3,2 juta lulusan SLTA diproyeksikan 50.000 ikut dalam program PJJ, pada tahun 2018 dari 3,4 juta lulusan SMK 100.000 ditargetkan adalah lulusan program PJJ. Berdasarkan analisis lokasi, daerah yang akan menjadi program PJJ yaitu daerah dengan empat kriteria, yaitu pertama, akses geografis. Kedua, APK yang rendah. Ketiga, anak yang tidak mampu secara ekonomi. Keempat, daerah yang tidak ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Tahun 2016-2017 prioritas daerah sasaran yakni yang memiliki APK terendah. Pada tahun 2018 sekolah yang menyelenggarakan SMK PJJ diperluas hingga ke seluruh Jawa Barat. Sistem kurikulum yang diberlakukan adalah sistem blok yakni diambil beberapa substansi yang paling penting dan prioritas menujnajng lifeskill dan potensi anak, serta menggunakan kurikulum khusus PJJ yang berbeda dengan kelas reguler. Pola pembelajaran yakni model *blended learning* dengan tiga hari sekolah/minggu berturut-turut selang seling atau di blok sesuai dengan kebutuhan. Tiga hari per minggu di lapangan praktek kerja mencari penghasilan dan raport sekolah diberikan oleh sekolah induk (Riyana 2019).²⁴

Penelitian lainnya juga mengurai berbagai faktor. Thaib (2018), misalnya, menunjukkan adanya keraguan sebagian masyarakat akan tercapainya tujuan penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat, yaitu menyiapkan lulusan berkualitas yang setara dengan SMA reguler yang diharapkan dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan atau memasuki dunia kerja. Hal ini ditunjukkan dengan, pertama, tidak terdapatnya materi sosialisasi yang baku bagi Penanggung Jawab/Kepala Sekolah, tutor/guru induk dan siswa. Kedua, tidak dilakukan seleksi TKB. Ketiga, seleksi tutor dilakukan dengan kriteria yang variatif untuk setiap TKB. Guru kunjung tidak diseleksi khusus namun hanya sebagai tugas tambahan. Pengelola ditunjuk oleh PJ kegiatan/Kepala Sekolah. Keempat, pada aspek persiapan tutorial: jadwal tutorial yang disusun belum mengacu pada

²⁴ Riyana, C. (2018). Evaluasi implementasi program pendidikan jarak jauh pada jenjang SMK di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

alokasi waktu yang telah ditetapkan dan tanpa penetapan model pembelajaran. Tutorial yang akan diterapkan untuk setiap mata pelajaran; bahan ajar cetak dan noncetak belum tersedia di lokas tutorial; dan materi pelatihan, pembekalan, pedoman, rencana dan bahan tutorial bervariasi antara satu sekolah induk/TKB dengan sekolah induk/TKB lainnya, tidak tersedia kit tuorial sebagai acuan tutor/guru induk dalam melaksanakan tugas. Kelima, Tutorial/pembelajaran tidak terlaksana sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, tidak terjadi kesinambungan fungsi antara tutor dan guru induk, proses tutorial seperti proses mengajar pada sekolah reguler, kehadiran siswa cenderung menurun, pada sebagian besar sekolah induk/TKB. Keenam, tidak ada instrumen monitoring yang baku, dan evaluasi tidak dilakukan untuk sebagian besar sekolah induk/TKB. Ketujuh, tidak tersedia instrumen evaluasi kinerja tutor/guru induk dan pengelola. Kedelapan, pembiayaan kegiatan tidak mencukupi untuk sebagian besar sekolah induk/TKB yang diteliti.²⁵



Gambar 1. APK 2016-2019 di Jawa Barat (Kemendikbud 2020).²⁶

²⁵ Thaib, D. (2018). *Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka di Jawa Barat*. Jakarta, SEAMOLEC.

²⁶ Kemendikbud (2020). "Sistem Informasi APK-APM." Diunduh 25 Juni, 2020, from <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>.

Merujuk pada tabel di atas, APK di Provinsi Jawa Barat nampak mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama dari tahun 2017 ketika PTJJ mulai diterapkan. Namun demikian perlu dianalisis lebih jauh terutama pada aspek tata kelola, proses pembelajaran dan peraturan perundangan untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Saat ini, penerapan PTJJ juga mendapatkan momentum secara nasional dengan adanya wabah Covid-19 di mana siswa diwajibkan untuk belajar dari rumah. Menurut laporan UNESCO (2020) sebanyak 1.543.446.152 siswa atau 89% dari total siswa di 188 negara terpaksa diliburkan. Di Indonesia sendiri, 68.265.787 siswa (termasuk mahasiswa) terpaksa diliburkan dan belajar di rumah.²⁷ Diharapkan kajian ini dapat menarik pelajaran berharga untuk diterapkan dalam menjawab tantangan *learning from home* akibat pandemi global yang kita hadapi saat ini di mana diprediksi bahwa dunia termasuk sektor pendidikan akan juga mengalami perubahan setelah pandemi ini berakhir, dengan kata lain akan memasuki era *the new normal* di mana beraktivitas secara jauh dalam beberapa aspek tertentu tetap akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

11. Lingkungan Strategis

a. Internasional

Hak anak atas pendidikan mencakup hak untuk belajar. Hampir tercapainya universalisasi sekolah dasar adalah salah satu pencapaian global yang luar biasa pada 50 tahun terakhir. Pada awal 1950-an, sekitar 50 persen anak usia sekolah dasar keluar dari sekolah. Hingga akhir tahun 1970, angkanya mencapai 28 persen. Hari ini, angka tersebut telah turun menjadi 9 persen. Namun tiga tantangan pendidikan menonjol hari ini sangat akut dan mendesak: pertama, akses yang tidak merata ke pendidikan untuk anak-anak dan remaja. Kedua, krisis pembelajaran

²⁷ UNESCO (2020). "Global monitoring of school closures caused by COVID-19." Diunduh 2 April, 2020 <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>.

global. Ketiga, pendidikan dalam keadaan darurat dan konteks yang rapuh (UNICEF 2019).

Terkait dengan poin kedua mengenai keadaan darurat dan konteks yang rapuh, pada masa pandemi Covid-19 ini UNESCO (2020) mencatat sebanyak 1.543.446.152 siswa atau 89% dari total siswa di 188 negara terpaksa diliburkan. Di Indonesia sendiri, 68.265.787 siswa (termasuk mahasiswa) terpaksa diliburkan dan belajar di rumah. Menurut Tam (2020), ada beberapa dampaknya bagi dunia pendidikan. *Pertama*, munculnya inovasi-inovasi pembelajaran baru. Covid-19 sebagai katalis mendorong perubahan dengan begitu cepat di mana institusi-institusi pendidikan bergerak mencari solusi inovatif. Di Hong Kong, siswa mulai belajar dari rumah menggunakan aplikasi interaktif. Di Tiongkok, 120 juta siswa mendapatkan akses pembelajaran melalui siaran televisi. Di Nigeria, standar asynchronous dalam jaringan (seperti materi membaca melalui Google Classroom) di-augmentasi dengan instruksi video tatap muka. Di Lebanon, pembelajaran dalam jaringan juga dilakukan, bahkan untuk mata pelajaran olahraga, siswa merekam latihan atletik mereka di rumah lalu dikirim dalam bentuk video ke guru mereka.

Kedua, meningkatnya kolaborasi institusi sektor pemerintah dan swasta. Konsorsium pembelajaran terdiri dari pemangku kepentingan—pemerintah, penerbit, profesional, penyedia teknologi, operator jaringan – bersama-sama memanfaatkan platform digital sebagai solusi. Di Tiongkok, kementerian pendidikan mengumpulkan kelompok konstituen yang beragam untuk membangun platform pembelajaran dalam jaringan yang berbasis awan (*cloud*). Di Hong Kong, forum *readtogether.hk* konsorsium yang terdiri dari 60 organisasi pendidikan, penerbit, media, menyediakan lebih dari 900 aset pendidikan termasuk video, buku, alat evaluasi dan jasa konseling secara cuma-cuma.

Ketiga, kesenjangan digital semakin melebar. Sementara kelas virtual pada tablet pribadi sudah merupakan norma sehari-hari di Hong Kong, banyak siswa di negara dengan ekonomi yang belum begitu maju mengandalkan pembelajaran dan tugas melalui WhatsApp atau email. Ketika kelas dilakukan secara dalam jaringan, mereka tidak bisa

mengikutinya karena tingginya harga gadget/laptop/*data plans*. Kecuali pembiayaan turun dan kualitas akses meningkat, maka kesenjangan kualitas pendidikan akan semakin sulit untuk dihindari. Kesenjangan digital juga akan semakin meluas ketika akses ke pendidikan ditentukan oleh akses ke teknologi.

Pada dasarnya akses ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terus meningkat dan secara signifikan akan terbentuk strategi belajar selama dekade mendatang. Namun, akses ke bahkan teknologi dasar sangat tidak merata di antara keduanya dan di dalam negara. Sekitar 1,3 miliar orang mendapatkan akses yang terbatas pada listrik. Hanya 32 persen sekolah dasar di negeri berpenghasilan rendah memiliki akses ke listrik. Di negara-negara maju, 81 persen dari populasi (94 persen dari kaum muda berusia 15-24) menggunakan Internet dibandingkan dengan 41 persen di negara-negara berkembang dan hanya 17 persen di negara berkembang negara (14 persen perempuan dan 21 persen laki-laki). Perkembangan dan pertumbuhan TIK di Indonesia berpotensi memiliki implikasi radikal untuk masa depan pembelajaran, dan bukan hanya untuk negara yang lebih kaya dan komunitas. Jantung teknologi adalah dalam bentuk potensi untuk memberikan apa pun, di mana saja, kepada siapa saja, kapan saja. Teknologi inovatif seperti pembelajaran adaptif, bermain game, kecerdasan buatan, virtual dan augmented reality potensi untuk mengubah cara kita belajar. Mereka juga menaruh tuntutan baru pada sistem pendidikan (misalnya konektivitas, kurikulum, peran yang berkembang untuk guru) dan pada peserta didik (misalnya keterampilan digital yang lebih tinggi) (UNICEF 2019).

c. Nasional

Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam meningkatkan akses ke pendidikan dalam beberapa dekade terakhir. Orde Baru banyak berinvestasi dalam membangun sekolah baru, terutama sekolah dasar, dan merekrut guru selama tahun 1970-an dan awal 1980-an ketika terjadi lonjakan harga minyak internasional. Pemerintah setelah Orde Baru juga

terus membangun sekolah terutama pada jenjang sekolah menengah pertama dan atas dan merekrut sejumlah besar guru (Rosser 2018).²⁸

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada posisi 0,707 di tahun 2018, yang menempatkannya pada kategori pembangunan manusia yang cukup tinggi, menempati urutan 111 dari 189 negara dan teritori, sejajar dengan Samoa. Antara 1990 dan 2018, IPM Indonesia naik dari 0,525 ke 0,707, kenaikan mencapai 34,6 %. (UNDP 2019). Sebelumnya pada tahun 2014, IPM Indonesia adalah 0,684 yang menempatkan Indonesia pada posisi kategori pembangunan manusia pada ukuran sedang, dan antara 1980 dan 2014 terjadi kenaikan dari 0,474 ke 0,684 (Sukasni dan Efendy 2017).²⁹ Sebagai negara yang sedang berkembang dan terus membangun kenaikan ini merupakan hal yang wajar, namun ketika melihat secara lebih mikro kompleksitas pembangunan pendidikan di Indonesia sesungguhnya menghadapi berbagai tantangan yang masih harus dibenahi.

Pada kenyataannya, peningkatan dalam akses ke pendidikan belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan luaran pendidikan. Beberapa studi tentang prestasi siswa di sekolah dasar dan sekolah menengah yang dilakukan selama Orde Baru menunjukkan tingkat pencapaian yang rendah, sedikit meningkat sepanjang periode tersebut, dibandingkan dengan negara-negara lain. Kinerja Indonesia di tes standar internasional untuk prestasi siswa dari tahun 1999–2015 menunjukkan sedikit perubahan dalam hal ini sejak jatuhnya Orde Baru. Hasil dari PISA (Program untuk Penilaian Siswa Internasional) pada tahun 2015, 42 persen dari anak Indonesia berusia 15 tahun gagal memenuhi standar minimum tiga area yang dicakup oleh tes: membaca, matematika, dan sains (Rosser 2018). Nilai PISA juga menunjukkan bahwa siswa Indonesia berprestasi sekitar tiga tahun di belakang rata-rata negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Lebih dari 50% anak

²⁸ Rosser, A. (2018). Beyond access: Making Indonesia's education system work. Victoria, Lowy Institute.

²⁹ Sukasni, A. and H. Efendy (2017). "The problematic of education system in Indonesia and reform agenda." Internartional Journal of Education 9(3): 183-199.

Indonesia berusia lima belas tahun tidak menguasai keterampilan dasar dalam membaca atau matematika. Meningkatkan kinerja dalam pendidikan Indonesia sangat penting untuk memenuhi tantangan mencapai status pendapatan tinggi (OECD 2015).

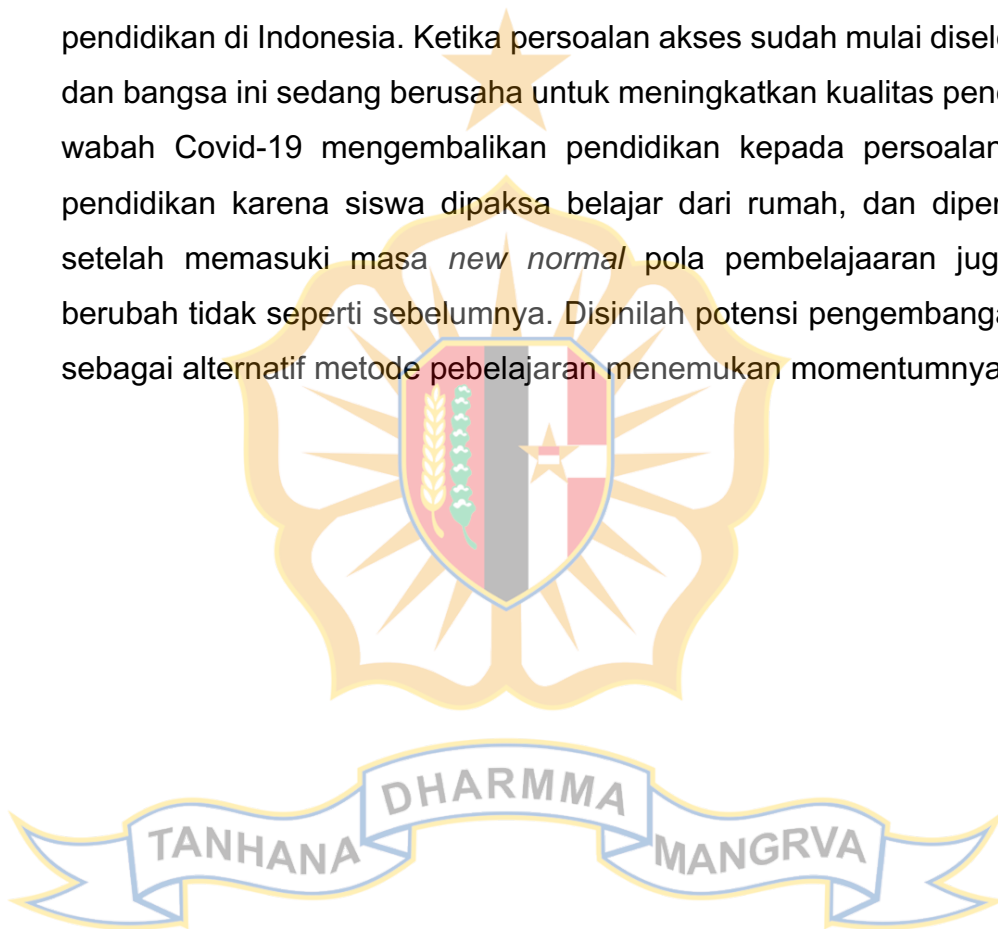
Kita memahami bahwa ancaman-ancaman di era globalisasi tidak selalu dalam bentuk ancaman militer, tapi bisa dalam bentuk *non-traditional threat* termasuk di antaranya kuantitas penduduk yang belum dimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (Lemhannas 2020). Dalam hal ini penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berikhtiar meningkatkan kualitas SDMnya karena populasi yang besar jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia bisa merubah potensi kekuatan ini menjadi potensi petaka demografi di mana manusia-manusia yang tidak memiliki pendidikan yang cukup bukan hanya menjadi beban tapi dapat berkontribusi pada terganggunya tatanan kehidupan dan tertib sosial masyarakat.

Terlebih dengan adanya wabah Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pembangunan dunia pendidikan di Indonesia. Hampir dipastikan bahwa pembangunan SDM yang menjadi prioritas pemerintah akan terhambat dengan merebaknya wabah yang memaksa masyarakat untuk berdiam diri di rumah. UNESCO (2020) mencatat sebanyak 1.543.446.152 siswa atau 89% dari total siswa di 188 negara terpaksa diliburkan. Di Indonesia sendiri, 68.265.787 siswa terpaksa belajar dari rumah. Perubahan yang begitu mendadak dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran jarak jauh membuat semua pihak terutama pendidik, peserta didik dan keluarga tergegap-gagap untuk menyesuaikan diri.

Beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah. *Pertama*, Mendikbud Nadiem Makarim mendorong pembelajaran daring dilakukan melalui platform *Rumah Belajar*. Mendikbud juga membatalkan Ujian Nasional dan proses belajar dari rumah dilaksanakan secara dalam jaringan/*on-line*. Disebutkan pula bahwa belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing,

termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah (Kemendikbud 2020). *Kedua*, Mendikbud juga mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi menjawab tantangan pendidikan di tengah wabah Covid-19 ini. Kolaborasi ini dilakukan di antaranya dengan Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft, Quipper, Ruang Guru, Sekolahmu dan Zenius. Semua pihak swasta ini siap memberikan fasilitas yang dapat diakses secara umum dan gratis (Siaran Pers Mendikbud 2020).

Wabah Covid-19 menambah kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia. Ketika persoalan akses sudah mulai diselesaikan dan bangsa ini sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, wabah Covid-19 mengembalikan pendidikan kepada persoalan akses pendidikan karena siswa dipaksa belajar dari rumah, dan diperkirakan setelah memasuki masa *new normal* pola pembelajaran juga akan berubah tidak seperti sebelumnya. Disinilah potensi pengembangan PTJJ sebagai alternatif metode pembelajaran menemukan momentumnya.





BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, menyebutkan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dengan maksud menindaklanjuti amanah dari undang-undang tersebut, Provinsi Jawa Barat memiliki visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2013 – 2018, yaitu visi “Membangunan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing” dan misi “Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Masyarakat Jawa Barat melalui Pendidikan yang Unggul, Terjangkau, Merata dan Terbuka”.

13. Tata Kelola Penyelenggaraan Program Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) SMA dan SMK di Jawa Barat

Dari sisi manajemen terutama tata kelola, ada empat fungsi yang menjadi rujukan: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *leading* (memimpin), dan *controlling* (pengawasan) (Daft 2010, 5-7). Perencanaan adalah mengidentifikasi tujuan dari performa organisasi dan memutuskan tugas-tugas dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada untuk mencapainya.³⁰ Dalam hal perencanaan PTJJ secara makro sudah berjalan dengan baik dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Barat. Namun pada tingkat lokal dan mikro terutama dalam aspek perencanaan pembelajaran belum berjalan dengan maksimal. Misalnya sebagian besar siswa SMA Terbuka masih belum mendapatkan informasi yang lengkap mengenai seperti apa dan bagaimana mereka akan belajar dengan program SMA Terbuka,

³⁰ Daft, R. L. (2010). Management. Mason, South-Western Cengage Learning.

yang mereka pahami adalah mereka akan sekolah secara cuma-cuma dan akan bersekolah selayaknya siswa-siswa di SMA regular. Artinya perencanaan pada tingkat lokal masih belum berjalan dengan maksimal.

Untuk SMK PJJ, pengelolaan program pendidikan dianggap berjalan cukup baik karena dukungan dari masyarakat dan DUDI di sekitar sekolah berada. Sosialisasi program ini juga dilakukan dengan cukup baik, perencanaan bukan hanya dalam memetakan jumlah siswa dan program keahlian yang akan dibuka, tapi juga termasuk sebaran tempat kegiatan belajar telah dilakukan dengan baik termasuk administrasi pendaftaran siswa baru. Namun ditemukan juga bahwa tidak ada keseragaman pada pengelolaan PJJ pada level sekolah induk, sementara pengelolaan pada TKB juga kurang memberikah alternatif yang seharusnya dikembangkan oleh institusi penyelenggara. Ke depan diperlukan adanya keseragaman pada pengelolaan PJJ pada level sekolah induk dan pengembangan pada level insitutiso penyelenggara. Pada umumnya SMK PJJ mendapatkan respon lebih baik dari masyarakat dari SMA Terbuka karena adanya dukungan dari DUDI terkait kepastian untuk melanjutkan atau mendapatkan pekerjaan.

Sementara perorganisasian merefleksikan bagaimana sebuah organisasi mencopa mencapai apa yang direncanakan, ini melibatkan pemberian tugas-tugas, mengelompokkan tugas-tugas ke dalam beberapa bagian, mendelegasikan kewenangan, dan mengalokasikan berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan dari organisasi. Aspek pengorganisasian juga walaupun secara normatif sudah baik namun pada tataran implementasinya masih belum maksimal. Misalnya, materi sosialisasi baku yang diperuntukkan untuk guru kunjung/tutor belum tersedia. Masih terdapat siswa yang tidak mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di mana informasi tentang pengenalan SMA Terbuka disampaikan. Seleksi TKB juga tidak dilakukan oleh sekolah induk karena ada yayasan yang ditunjuk berdasarkan kesiapan infrastruktur. Pelaksanaan rekrutmen tutor dan pengelolaan kegiatan seleksi tutor diimplementasikan dengan kriteria yang beragam untuk setiap TKB. Untuk menjadi guru kunjung juga tidak dilakukan melalui seleksi namun mendapatkan tugas tambahan. Untuk pengelola ditunjuk oleh PJ kegiatan/kepala sekolah. Dengan demikian, walaupun dalam level provinsi nampak baik dengan dukungan dan

motivasi dari Gubernur, namun dalam tingkat lokal masih kurang berjalan dengan optimal. Artinya dalam aspek kepemimpinan dan pengorganisasian di tingkat lokal agar semuanya berjalan sesuai rencana belum berjalan secara optimal. Demikian pula dalam aspek pengawasan agar semuanya berjalan menuju target yang direncanakan dan kemampuan memberikan koreksi belum berjalan dengan baik, terutama pada program SMA Terbuka.

Dalam aspek sumber daya manusia, dalam hal ini tutor, berdasarkan Permendikbud No 19 tahun 2014 disebutkan bahwa tutor adalah pendidik yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK. Pada pelaksanaannya, ternyata tidak ada pembekalan yang bagi guru yang menjadi tutor, karena tutorial tidak sama dengan mengajar. Dengan demikian dilihat dari aspek pengorganisasian tidak ada persiapan yang memadai untuk menyiapkan keberadaan tutor dan kegiatan tutorial sebagaimana mestinya. Persyaratan pendidik tercantum pada Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud No 1670/D/LK/2014 seharusnya dijadikan rujukan dan ditaati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan mencakup: pertama, rekrutmen tutor dan tenaga kependidikan yang bertugas di TKB. Kedua, penugasan guru kunjung yang bertugas di sekolah induk. Ketiga, rekrutmen tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah induk dan TKB. Keempat, rekrutmen tenaga kependidikan. Kelima, penyiapan bahan ajar cetak maupun *on-line*. Keenam, penyiapan sarana prasarana pembelajaran. Ketujuh, penyusunan jadwal pembelajaran. Kedelapan, penyelenggaraan MPLS. Kesembilan, pembiayaan. Kesepuluh, program pengelolaan mengacu pada panduan pengelolaan SMA Terbuka. Kesebelas, belum tersedia instrumen penilaian kepala sekolah sebagai Penanggung Jawab SMA Terbuka. Keduabelas, sebagian sekolah memanfaatkan sistem informasi manajemen yang dimiliki sekolah induk, belum tersedia sistem informasi khusus untuk SMA Terbuka (Thaib 2019).³¹

³¹ Ibid.

Sementara untuk pelaksanaan SMK PJJ merujuk pada pengelolaan siswa dan pengelolaan program pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya kedua aspek tersebut berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan bahwa siswa memiliki ijazah SMP/MTS/PAKET B, berusia antara 16-21 tahun saat mendaftar, memiliki keterbatasan sosial, ekonomi, budaya dan geografis serta keterbatasan waktu, namun hanya separuh yang melampirkan surat dukungan dari dunia industri (DUDI). Salah satu penyebabnya karena kebanyakan siswa memang belum bekerja atau memiliki pekerjaan tidak tetap. Selain itu beberapa siswa juga menganggap bahwa penyediaan tempat praktik merupakan kewajiban sekolah sehingga tidak merasa perlu mengusahakan hal tersebut. Pengelolaan program pendidikan dianggap berjalan cukup baik karena dukungan dari masyarakat dan DUDI di sekitar sekolah berada. Namun ditemukan juga bahwa tidak ada keseragaman pada pengelolaan PTJJ pada level sekolah induk, sementara pengelolaan pada TKB juga kurang memberikah alternatif yang seharusnya dikembangkan oleh institusi penyelenggara. Sosialisasi program ini juga dilakukan dengan cukup baik, perencanaan bukan hanya dalam memetakan jumlah siswa dan program keahlian yang akan dibuka, tapi juga termasuk sebaran tempat kegiatan belajar telah dilakukan dengan baik termasuk administrasi pendaftaran siswa baru. Selain itu pelaporan kegiatan pembelajaran juga dilaksanakan dengan rutin termasuk juga kerjasama dengan DUDI (Riyana 2018, H. 18-22, h. 23).³²

Pembiayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan suatu program. Berdasarkan Permendikbud No. 119 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 72 Tahun 2013, pembiayaan program PTJJ dapat menggunakan dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Namun karena tidak diatur secara jelas dan spesifik akhirnya terjadi kesenjangan pembiayaan dikarenakan ketentuan yang berlaku sebagian besar sama dengan sekolah dengan program pembelajaran reguler tatap muka, padahal secara aktivitas kegiatan terutama kegiatan proses pembelajaran sangat berbeda. Misalkan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah memiliki dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) hanya saja pada

³² Riyana, C. (2018). Evaluasi implementasi program pendidikan jarak jauh pada jenjang SMK di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

petunjuk teknis dana BOS yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tidak ada ditujukan khusus untuk pembiayaan sekolah penyelenggara PTJJ.

Satu contoh sekolah yang merupakan *best practice* dalam tata kelola PTJJ adalah SMAN 5 Bandung di mana jumlah siswa berbanding dengan jumlah tutor dan guru, jumlah siswa di TKB pun sesuai dengan rombongan belajar yaitu 1 TKB maksimal 36 orang. Sekolah ini juga memiliki kepala sekolah yang memiliki komitmen akan berhasilnya program ini, sehingga sejalan dengan teori manajemen kepemimpinan Daft (2010). Kepala sekolah juga menunjuk koordinator PTJJ, jadi tidak dirangkap dengan kepala sekolah, agar bisa lebih fokus pada menangani hak-hal akademik dan non-akademik siswa.³³

Contoh berikutnya yang juga cukup berhasil adalah SMK Nurussalam Salopa Tasik yang berbasis pesantren. Aspek kepemimpinan kepala sekolah juga memainkan peran penting di mana fungsi koordinator PTJJ tidak dirangkap dengan kepala sekolah sehingga bisa fokus dalam mengurus hal-hal akademik dan non0akademik siswa. Jumlah siswa juga sebanding dengan jumlah guru dan tutor, jumlah siswa di TKB pun sesuai dengan rombongan belajar yaitu satu TKB maksimal 36 orang. Kompetensi keahliannya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena di daerah ini mayoritas terdapat lahan pertanian sehingga kompetensi keahlian yang dibuka pun sudah sesuai yaitu kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.³⁴

Sementara satu contoh sekolah yang masih belum berhasil adalah SMAN 1 Parung Panjang Bogor di mana pengelolaan dan fungsi kepala sekolah dan koordinator dirangkap oleh satu orang sehingga kurang fokus dalam menangani hal-hal yang terkait PTJJ. Contoh berikutnya juga masih belum berhasil ada SMKN 8 Garut, di mana kompetensi keahlian PTJJ yang dibuka kurang sesuai dengan yang dibutuhkan di lingkungan sekitar yaitu kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah kompetensi keahlian seperti perkebunan dan kerajinan tangan.³⁵

³³ Fazhar Restu, Manajer Jaringan, SEAMOLEC, wawancara 17 Juli 2020.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

14. Proses Pembelajaran pada Program PTJJ SMA dan SMK di Jawa Barat

Barat

Sebagaimana diuraikan Allen (2016), beberapa keuntungan dari PTJJ berbasis TIK: *tactical advantages* (keuntungan taktis) yaitu fleksibilitas untuk belajar di mana saja dan kapan saja; mereduksi biaya perjalanan; media untuk melacak, meng-update dan mengatur pembelajaran. Berikutnya *training delivery advantages* (keuntungan penyelenggaraan pelatihan/pembelajaran) yaitu *consistent delivery* (pemberian materi yang konsisten); pembelajaran yang lebih *personalized*; konten grafik dan animasi yang interaktif; material yang bisa disesuaikan; *self-paced programs* (kecepatan program dapat disesuaikan). Untuk keuntungan taktis belajar di mana saja, mereduksi biaya perjalanan (siswa tidak harus setiap hari datang ke sekolah) sudah terbukti membantu proses PTJJ. Demikian juga pada aspek *training delivery advantages* dan pembelajaran yang lebih *personalized* memberikan banyak keuntungan.³⁶ Namun untuk konten grafik dan animasi yang interaktif masih belum dapat terlaksana karena persiapan yang hampir minim. Secara umum juga hanya sebagian sekolah dan siswa yang secara relatif optimal menggunakan fasilitas internet.

Hasil temuan terutama untuk SMA Terbuka menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan pada sebagian besar Standar Nasional Pendidikan dengan hasil penelitian pada enam SMAN terbuka di Jawa Barat. Ada beberapa faktor yang ditengarai memberikan kontribusi terhadap hal ini. Pertama, SMA Terbuka menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum SMA reguler dengan proses pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pola pembelajaran mandiri untuk pendidikan menengah dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: belajar mandiri secara individu, belajar mandiri secara kelompok dan tutorial tatap muka. Hal ini memberikan beberapa konsekuensi yaitu bahan ajar yang digunakan oleh siswa SMA Terbuka haruslah bahan ajar yang dirancang khusus untuk pembelajar mandiri. Permasalahannya adalah apakah bahan ajar yang digunakan saat ini yang berupa bahan ajar SMA reguler yang sudah ditambahkan dengan suplemen benar-benar merupakan bahan ajar mandiri. Bahan ajar mandiri dapat berupa modul cetak maupun non cetak yang

³⁶ Allen, M. W. (2016). *Guide to e-learning*. New Jersey, John Wiley & Sons.

dirancang khusus untuk belajar mandiri yang dilengkapi dengan panduan belajar bagi siswa dan pendoman bimbingan belajar bagi tutor/guru bina pamong. Dengan bahan ajar ini, kekurangan jumlah jam mengajar guru kunjung/tutor karena kondisi sekolah induk/TBK diharapkan dapat diatasi tanpa mengurangi capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Kedua, peserta didik. Penerapan pembelajaran mandiri menuntut peserta didik memiliki kemandirian belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik pada sistem belajar tatap muka. Karena itulah siswa program PTJJ perlu dipersiapkan agar dapat memiliki kemampuan belajar mandiri. Kemampuan ini dapat dilatih dan momen yang tepat untuk memperkenalkannya adalah pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Ketiga, tutor. Pada pasal 1 Permendikbud No 19 Tahun 2014 dinyatakan bahwa tutor adalah pendidik yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan, baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, guru yang bertugas sebagai pendidik di SMA Terbuka adalah tutor. Tutorial tidak sama dengan mengajar, oleh karena itu pendidik yang bertugas sebagai tutor perlu dilatih agar dapat berperan sebagai tutor. Persyaratan pendidik tercantum pada Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud No 1670/D/LK/2014 perlu ditaati dengan konsisten.

Keempat, sarana prasarana. TKB juga ditetapkan pada Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud No 1670/D/LK/2014. Untuk itu pengelolaan SMA Terbuka perlu memastikan bahwa TKB yang ditetapkan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan tersebut, sehingga penarikan siswa ke sekolah induk karena sarana prasarana TKB yang tidak memadai, misalnya yang terjadi di SMAN Terbuka 187 Garut tidak terulang kembali.

Tidak seluruh sekolah induk dan TKB mempersiapkan proses pembelajaran dengan berbagai modus seperti yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari jadwal yang disusun hanya terdapat 4 dari 21 (19%) sekolah induk dan TKB yang memiliki jadwal tutorial daring, sementara sisanya tidak. Jadwal tutorial tatap muka tersedia di hampir seluruh sekolah induk/TKB yang diteliti (95%) dan jadwal tutorial mandiri tersedia di 14 (67%) dari 21 sekolah induk /TKB. Pengamatan di tiga

sekolah induk dan TKB serta hasil wawancara dengan tutor dan siswa pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar cetak belum tersedia dan siswa menerima materi pembelajaran dalam bentuk file yang dibagikan oleh guru kunjung untuk dua mata pelajaran melalui media sosial WA. Keadaan ini membuat proses pembelajaran menjadi terhambat.

Saat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dihadiri oleh 123 (82% dari 150 siswa baru dari 22 SMA terbuka, namun tidak semua sekolah induk /TKB menyampaikan materi tentang sistem pembelajaran mandiri, model pembelajaran SMA Terbuka, sistem penilaian hasil belajar dan penggunaan TIK pada sistem pembelajaran daring di SMA Terbuka. Siswa baru yang tidak hadir tidak memiliki pengetahuan apa pun tentang proses pembelajaran yang akan mereka lakukan, mereka hanya mengetahui bahwa mereka akan sekolah secara gratis dan proses pembelajaran kurang lebih sama dengan di SMA reguler.



Gambar 2. Salah satu TKB di Kabupaten Bogor (Fazhar Restu, 2020).

Karakteristik siswa SMA terbuka juga berbeda dengan siswa SMA reguler, terutama dari kemampuan akademiknya. Merujuk pada hasil wawancara dengan siswa di empat sekolah induk/TKB, motivasi utama mengikuti SMA Terbuka adalah untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik untuk yang sudah bekerja dan mendapatkan pekerjaan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Perlu upaya lebih untuk mempersiapkan mereka menjadi pembelajar mandiri mengingat mereka sudah cukup lama tidak duduk di

bangku sekolah. Diperlukan kegiatan orientasi lainnya sebelum mereka betul-betul menjadi siswa SMA Terbuka, ikhtiar ini tidak cukup dilakukan sekali dalam wadah MPLS. Diharapkan ada keseragaman penyelenggaraan MPLS di setiap sekolah induk/TKB dan di selenggarakan sedemikian rupa agar dapat membangkitkan semangat pada calon siswa dalam menjalan proses pembelajaran (Thaib 2018).³⁷

Di samping itu program ini belum mampu memanfaatkan pembelajaran jarak jauh berbasis digital yang menawarkan berbagai alternatif pembelajaran yang lebih bermakna. Misalnya, sebagaimana diuraikan oleh Krishartomo (2011), dalam proses pembelajaran PTJJ juga dimungkinkan diadakannya pembelajaran kolaboratif antar siswa walaupun mereka tidak berada di satu tempat. Pembelajaran kolaboratif merupakan cara yang efektif dan menarik untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Dalam pembelajaran koorpatif, siswa dibagi atau mengorganisasikan diri ke dalam kelompok-kelompok kecil, di dalamnya ada siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda, lalu menggunakan berbagai aktivitas pembeljaran untuk meningkat pehamaman terhadap mata pelajaran.³⁸ Namun kita tidak menemui pembelajaran kolaboratif ini diterapkan karena berbagai keterbatasan di antara kurangnya persiapan dari sisi guru dan juga dari sisi siswa sendiri. Ke depan PTJJ perlu diselenggarakan secara lebih kreatif dan inovatif sehingga memperkaya pengalaman belajar siswa, yang mana juga membutuhkan persiapan yang lebih matang dalam penyelenggaraannya.

Penyelenggara menggunakan acuan proses pendidikan dengan indikator: Pertama, sekolah merencanakan prosea pembelajaran sesuai ketemtuan. Kedua, proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Ketiga, pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pebelajaran. Hasil penelitian pada SMA Terbuka menunjukkan: Pertama, proses pembelajaran dilaksanakan rata-rata dua kali pertemuan, masing-masing satu jam per semester, tatap muka yang terjadwal selama 35 menit per minggu per mata pelajaran. Ada TKB di bawah Sekolah Induk SMAN 1 Ciamis yang bisa menyelenggarakan proses

³⁷ Thaib, D. (2019). Studi evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

³⁸ Krishartomo, T. (2011). "Using internet and multimedia technology to develop an integrated e-learning media than can guide, facilitate and improve rthe quality of cooperative learning activities." V: 41-73

pembelajaran hanya tatap muka, karena TKB di lingkungan pesantren ada peraturan tidak boleh menggunakan handphone (HP). Kedua, semua sekolah induk melakukan kegiatan pengawasan namun belum ada instrumen baku untuk monitoring. Semua sekolah mengadakan penilaian dalam proses pembelajaran

Terjadi kesenjangan dalam proses pembelajaran untuk jumlah, dan waktu pertemuan. Proses pembelajaran ada yang hanya tatap muka saja. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Sekolah ada yang secara berkala setiap bulan, ada yang setiap triwulan sekali, hanya belum ada instrument monitoringnya. Proses pembelajaran juga mengacu pada Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang penilaian pendidikan dengan indikator: Pertama, aspek penilaian sesuai ranah kompetensi. Kedua, teknik penilaian obyektif dan akuntabel. Ketiga, penilaian pendidikan ditindaklanjuti. Keempat, instrumen penilaian menyesuaikan aspek penilaian. Kelima, penilaian dilakukan mengikuti prosedur. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, untuk unsur kognitif melalui ulangan harian, ujian semester dan ujian akhir yang soalnya disamakan dengan sekolah induk., terutama untuk untuk mata pelajaran yang termasuk mata pelajaran ujian nasional. Kedua, unsur psikomotorik dan afektif dilakukan oleh guru kunjung/guru bina dan tutor. Ketiga, pada SMAN Terbuka Khusus Atlet (SMAN 10 Kota Bandung) Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), dan Ujian Sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah induk harus diikuti oleh seluruh peserta didik kelas terbuka pada semua jenjang. Keempat, kesulitan dalam menilai hasil belajar untuk aspek sikap. Terjadi kesenjangan dalam penilaian hasil belajar untuk aspek sikap (Thaib 2019).³⁹

Untuk SMK PJJ, proses pembelajaran dapat dianalisis dari dua aspek yaitu proses pembelajaran dan kualitas materi pembelajaran. Kedua aspek ini jika digabung menghasilkan skor yang sangat baik. Namun jika dirinci maka ini hanya pada kualitas pembelajaran saja, untuk aspek kualitas proses pembelajaran hanya pada tahap cukup baik. Terkait kualitas proses pembelajaran memang mendapatkan penilaian yang variatif. Kepala sekolah, misalnya, beranggapan bahwa selama ini proses pembelajarantelah berjalan dengan sangat baik. Tapi guru dan siswa berpendapat pada taraf cukup baik.

³⁹ Thaib, D. (2019). Studi evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

Responden kepala sekolah berpendapat bahwa pihak sekolah telah berusaha untuk agar guru/tutor merumuskan rancangan pembelajaran, Learning Management System (LMS) yang ada dapat digunakan dengan mudah oleh siswa dan guru. Siswa dan guru juga dapat merujuk pada sumber belajar cetak maupun non-cetak yang tersedia pada setiap mata pelajaran. Selain itu juga disediakan layanan bantuan bagi pembelajaran mandiri siswa. Keseluruhan aspek telah diimplementasikan dengan sangat baik. Penyediaan sumber belajar cetak dilakukan dengan memanfaatkan sumber belajar cetak yang dimiliki sekolah reguler. Pemanfaatan berbagai sumber belajar menjadi salah satu solusi untuk membuka akses seluasnya kepada sumber belajar cetak. Namun responden guru memberikan penilaian kategori tidak maksimal terhadap proses pembelajaran. Menurut mereka kemudahan pemanfaatan LMS dan variasi aktifitas pada LMS dianggap masih pada taraf cukup baik, artinya seharusnya masih bisa lebih dioptimalkan. Untuk ketersediaan sumber belajar dan bantuan kepada siswa dianggap telah dijalankan dengan sangat baik. Hampir sejalan dengan responden guru, responden siswa juga berpendapat bahwa aspek kemudahan penggunaan LMS dan variasi aktifitas pada LMS berada pada tahap cukup baik, artinya seharusnya masih bisa untuk dioptimalkan, demikian juga pada aspek penyediaan kesempatan praktik bagi siswa. Responden siswa menganggap bahwa ketersediaan sumber belajar cetak dan non-cetak dan layanan bantuan sudah terimplementasi dengan sangat baik.

Terkait kualitas materi pembelajaran, seluruh responden menilai pemberian materi yang disampaikan berdasarkan kurikulum yang disusun secara terpusat telah diimplementasikan dengan sangat baik. Dari ketujuh aspek yang dinilai: bahan ajar yang disajikan sangat membantu proses belajar siswa, intensitas praktik memadai, materi dalam bahan ajar yang disajikan sesuai dengan tujuan belajar, bahan ajar disajikan sesuai dengan kebiasaan/gaya belajar siswa, bahan ajar yang disajikan dapat dipahami dengan mudah, materi yang disajikan memiliki unsur kekinian (*up to date*), materi pada bahan ajar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/dunia usaha dunia industri (DUDI) semuanya mendapatkan nilai sangat baik oleh responden guru, hanya pada aspek intensitas praktik saja yang dinilai cukup baik karena diharapkan dapat lebih optimal. Bagi responden siswa, kesesuaian penyajian materi dengan gaya belajar siswa dan

kemudahan pemahaman terhadap sisi materi pembelajaran mendapatkan penilaian yang sangat baik.

PTJJ juga memiliki potensi untuk dikembangkan seiring dengan persiapan memasuki era *new normal* saat ini di mana bukan saja masyarakat masih akan bersikap penuh dengan hati-hati terhadap wabah Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya ini, namun juga adanya kesadaran bahwa ternyata ada berbagai ragam aktivitas baik di dunia pendidikan maupun lainnya yang ternyata dapat dikerjakan secara jarak jauh di rumah dengan perangkat digital tanpa harus datang ke sekolah atau ke kantor. UNESCO (2020) melaporkan terdapat 1.543.446.152 siswa atau 89% dari total siswa di 188 negara terpaksa diliburkan. Di Indonesia sendiri, 68.265.787 siswa terpaksa belajar di rumah. Kita menyaksikan bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga institusi pendidikan baik negeri maupun swasta terdorong untuk menemukan inovasi-inovasi baru yang akan memudahkan siswa untuk melakukan proses pembelajaran dari rumah. Pihak pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pihak swasta seperti penyedia jasa internet dan para pemangku kepentingan terkait lainnya juga perlu didorong untuk memperluas pelayanannya agar bisa menjangkau masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Demikian juga para pakar teknologi pendidikan perlu didorong untuk menemukan terobosan-terobosan pedagogi *out of the box* yang bukan hanya memperkaya *learning experience* (pengalaman belajar) siswa dengan membuatnya lebih bermakna, tapi juga membuat penyelenggaraan pendidikan semakin efektif dan efisien. Dengan demikian PTJJ memiliki potensi pengembangan yang sangat besar baik saat ini maupun di masa yang akan datang, terlebih dengan adanya wabah Covid-19 yang telah mengakselerasi proses perubahan pola hidup masyarakat.

Terkait tenaga pendidik, hasil penelitian pada SMA Terbuka menunjukkan: Pertama, guru kunjung, kepala sekolah, tenaga kependidikan, laboran dan pustakawan pada sekolah induk sesuai ketentuan. Kedua, tutor yang ditugaskan di TKB tidak tersedia untuk semua mata pelajaran, sehingga untuk sebagian besar TKB mereka juga bertugas untuk mata pelajaran yang kompetensinya tidak dipenuhi. Ketiga, tidak semua TKB memiliki laboran dan pustakawan sesuai ketentuan. Terjadi kesenjangan pada ketersediaan dan kompetensi tutor, laboran

dan pustakawan di TKB (Thaib 2019).⁴⁰ Penyelenggara menggunakan Permendiknas No Tahun 2007 dan No 24 Tahun 2008 tentang pendidik dan tenaga kependidikan sebagai acuan dengan indikator: Pertama, ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan. Kedua, ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan. Ketiga, ketersediaan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan. Keempat, ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan. Kelima. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan.

Untuk SMK PJJ, Riyana (2018) menguraikan bahwa responden kepala sekolah dan guru memberikan penilaian sangat baik pada aspek profil SDM pengelola program SMK PJJ. Parameter-parameter yang dinilai adalah sekolah memiliki struktur lengkap pengelola PJJ yang terdiri dari kepala sekolah, guru/tutor, pengelola sekolah penyelenggara, tenaga kependidikan lainnya; adanya rencana strategi pengelolaan kegiatan belajar. Pendidik pada sekolah penyelenggara telah berfungsi sebagai perancang program pembelajaran, pengembangan bahan ajar dan media, penulis soal/tugas/evaluasi, pengolah hasil belajar, pengampu mata pelajaran, tutor, pembimbing praktik, penguji; guru bimbingan karir (BK) berfungsi sebagai penghubung industri dalam program PTJJ.

Responden kepala sekolah memberikan penilaian yang baik terhadap sebagian besar komponen parameter yang dinilai, di antaranya terkait kepemilikan sekolah pada struktur yang lengkap dalam pengelolaan PTJJ yang terdiri dari kepala sekolah, guru/tutor, pengelola sekolah penyelenggara PTJJ dan TKB, dan tenaga kependidikan lainnya. Kepala sekolah juga menilai bahwa SDM memiliki rencana/strategi pengelolaan kegiatan belajar yang meliputi pendidik (guru/tutor) dan tenaga kependidikan, fasilitas belajar dan praktik di sekolah induk dan TKB, pendistribusian bahan ajar, pemanfaatan dana BOS dan peningkatan intensitas kerjasama dengan DUDI. Di samping itu, pendidik pada sekolah penyelenggara PTJJ telah berfungsi sebagai perancang program pembelajaran, pengembang bahan ajar dan media, penyebar luas dan pengunggah bahan ajar dan media, penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi, mampu melakukan pengolahan

⁴⁰ Thaib, D. (2019). Studi evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

hasil belajar, pengampu mata pelajaran, tutor, pembimbing praktik dan penguji. Penilaian cukup baik hanya pada aspek terkait peran tambahan bagi guru BK yaitu menghubungkan siswa dan sekolah dengan DUDI. Responden guru memberikan penilaian cukup baik terhadap kualitas profil SDM. Secara khusus di antaranya pada parameter kepemilikan sekolah terhadap struktur lengkap pengelolaan PTJJ yang terdiri dari kepala sekolah, guru/tutor, pengelola sekolah penyelenggara PTJJ dan TKB, dan tenaga kependidikan lainnya. Demikian halnya dengan tingkat penilaian yang sama pada asumsi bahwa pendidik pada sekolah penyelenggara PTJJ telah berfungsi sebagai perancang program pembelajaran, pengembang bahan ajar dan media, penyebarf luas dan pengunggah bahan ajar dan media, penulis soal, tugs, dan/atau evaluasi, mampu melakukan pengolahan hasil belajar, pengampu mata pelajaran, tutor, pembimbing praktik dan penguji.⁴¹



Gambar3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Fazhar Restu, 2020).

Persiapan tutorial yang dilakukan guru kunjung/tutor bervariasi dan tidak ada satu unsur persiapan tutorial yang dilakukan oleh seluruh guru kunjung/tutor.

⁴¹ Riyana, C. (2018). Evaluasi implementasi program pendidikan jarak jauh pada jenjang SMK di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

Unsur-unsur pada aspek persiapan tutorial bagi guru kunjung/tutora sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tutorial tidak bisa disamakan dengan mengajar baik dilihat dari penyampaian materi maupun waktu yang diberikan. Guru kunjung sudah terbiasa dengan mengajar tidak mentutor, sekalipun mereka memiliki kualifikasi akademik yang memadai. Guru-guru ini perlu mendapatkan pelatihan untuk menjadi tutor. Diperlukan adanya pembekalan bag guru kunjung dan tutyor untuk paling tidak menyamakan persepsi. Untuk setiap mata pelajaran guru kunjung dan tutor secara bersama-sama menyusun perencanaan tutorial yang melingkupi materi esensi yang akan diberikan pada sertiap pertemuan, model tutorial yang akan diimplementasikan, alokasi waktu yang akan disediakan dan apa yang akan dilakukan guru kunjung dan tutor pada setiap pertemuan. Perencanaan ini dimanfaatkan secara konsisten pada pelaksanaan tutorial (Thaib 2018).

Jadwal tutorial yang sudah dirancang belum sepenuhnya dapat diterapkan secara konsisten disebabkan oleh ketidakhadiran dan atau keterlambatan hadir guru kunjung/tutor dan siswa. Tingkat kehadiran siswa pada hari Sabtu cenderung lebih sedikit dibanding hari Minggu karena mereka tidak mendapatkan izin dari atasan tempat mereka bekerja. Pada lokasi yang disupervisi, pelaksanaan tutorial oleh guru kunjung di sekolah induk seperti proses mengajar biasa dengan waktu yang sangat minim sehingga materi pembelajaran yang diberikan diberikan juga terbatas. Cenderung pasifnya siswa dan keterbatasan pengetahuannya serta tidak tersedianya bahan ajar cetak juga memberikan kontribusi pada terhambatnya proses tutorial tatap muka. Siswa juga belum melaksanakan tutorial karena baru menerima bahan ajar dalam bentuk file untuk mata pelajaran tertentu. Kegiatan yang mengarah pada latihan keterampilan di lokasi praktik adalah kegiatan yang dominan dilakukan oleh tutor pada mata pelajaran tertentu. Meskipun demikian, pengeola TKB bersama tutor secara aktif melakukan *home visiting*.

Kemampuan proses pembelajaran tutorial di SMA Terbuka sebagai bekal siswa menghadapi ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan SMA Terbuka di provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari penyelenggaraan SMA Terbuka yakni meningkatkan APK propinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian yang disampaikan pada menunjukkan bahwa 14 (67%) dari 21 PJ kegiatan meyakini bahwa penyelenggaraan tutorial dapat mempersiapkan siswa menghadapi ujian tengah dan akhir semester. Namun pengamatan peneliti di satu Sekolah Induk lokasi tutorial menunjukkan mendukung pendapat sebaliknya. Terbatasnya alokasi waktu yang disediakan pada proses tutorial untuk setiap mata pelajaran, keterbatasan waktu dengan muatan kurikulum yang padat, proses pembelajaran yang jauh dari ideal, belum tersedianya bahan ajar cetak pada saat proses pembelajaran berlangsung, terkendalanya pemanfaatan bahan ajar daring, belum tersedianya instrumen baku pemantauan serta belum sepenuhnya guru kunjung/tutor berperan sesuai dengan fungsinya merupakan hal-hal yang mendasari kesimpulan ini. Apabila kendala ini dapat diatasi tidak tertutup kemungkinan tidak saja akan tumbuh keyakinan siswa mampu memperoleh hasil ujian akhir yang baik namun mereka juga mampu menghadapi Ujian Nasional. Pendapat peneliti didasari atas potensi belajar (rapor) siswa sekolah ini semester lalu yang seluruhnya baik.

Sementara itu, sosialisasi SMA terbuka diberikan kepada tutor, siswa dan pengelola dengan materi sosialisasi yang bervariasi, belum tersedia materi sosialisasi yang baku. Seluruh guru kunjung/tutor mengikuti kegiatan sosialisasi paling tidak satu kali dengan nara sumber yang bervariasi. Materi sosialisasi baku yang diperuntukkan untuk guru kunjung/tutor belum tersedia. Masih terdapat siswa yang tidak mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di mana informasi tentang pengenalan SMA Terbuka disampaikan. Seleksi TKB juga tidak dilakukan oleh sekolah induk karena ada yayasan yang ditunjuk berdasarkan kesiapan infrastruktur. Pelaksanaan rekrutmen tutor dan pengelolaan kegiatan seleksi tutor diimplementasikan dengan kriteria yang beragam untuk setiap TKB. Untuk menjadi guru kunjung juga tidak dilakukan melalui seleksi namun mendapatkan tugas tambahan. Untuk pengelola ditunjuk oleh PJ kegiatan/kepala sekolah. Jadwal tutorial dirancang oleh sekolah induk/TKB belum merujuk pada lokasi waktu yang ditetapkan dan tanpa penetapan model pembelajaran/tutorial apa yang akan diimplementasikan pada

setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran mendapatkan perlakuan yang sama.⁴²

Terkait output (luaran), hasil penelitian menunjukkan: Pertama, baru dua sekolah yang menghasilkan lulusan, SMN Terbuka 18 Garut dan SMAN Terbuka 6 Garut. Kedua, setiap tahun lulusan SMAN Terbuka 18 Garut mampu bersaing mengikuti SBMPTN dan perguruan tinggi swasta. Ketiga, hanya satu Sekolah Terbuka Khusus Atlet (SMAN10 Kota Bandung) memiliki peningkatan kompetensi keterampilan siswa melalui program kewirausahaan dan program berbasis TIK. Keempat, sulit mengukur ketercapaian kompetensi pada dimensi sikap. Untuk kompetensi pada dimensi pengetahuan dan keterampilan, SMA Terbuka 18 Garut tidak terdapat kesenjangan dan salah satu tujuan dari SMA Terbuka terpenuhi, yakni menghasilkan lulusan yang dapat melanjutkan ke Pendidikan Tinggi. Terjadi kesenjangan pada kompetensi untuk dimensi sikap (Thaib 2019).⁴³ Penyelenggara menggunakan Permendibud No 20 Tahun 2016 tentang kompetensi lulusan sebagai acuan dengan indikator: Pertama, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap. Kedua, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan. Ketiga, lulusan memiliki kompetensi keterampilan.

Untuk SMK PJJ, Riyana (2018) menuturkan bahwa luaran atau output diukur dengan menggunakan aspek kualitas pelaksanaan evaluasi dan pencapaian hasil evaluasi. Secara umum output jauh dinilai sudah sangat baik. Walaupun demikian masing aspek mendapatkan penilaian pencapaian yang berbeda, pencapaian hasil evaluasi dinilai cukup baik dan masih bisa dioptimalkan, sementara kualitas pelaksanaan evaluasi dinilai sudah sangat baik. Seluruh responden (kepala sekolah, guru dan siswa) menganggap kualitas pelaksanaan evaluasi secara umum berjalan sangat baik.

Sementara guru memberikan penilaian bahwa pelaksanaan evaluasi berjalan baik bukan hanya karena kelancaran siswa dalam mengikuti proses evaluasi, tapi juga karena materi yang diujikan sesuai dengan materi yang diajarkan serta metode evaluasi yang digunakan sesuai dengan jenis aktivitas pembelajaran yang telah diikuti. Siswa juga memberikan penilaian sangat baik

⁴² Thaib, D. (2019). Studi evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

⁴³ Ibid.

mengenai pelaksanaan evaluasi ini karena selal dapat mengikuti proses evaluasi pembelajaran tanpa ada halangan yang berarti.

Untuk aspek pencapaian hasil evaluasi, kepala sekolah menganggap perolehan nilai hasil evaluasi belajar secara umum cukup baik. Kepala sekolah menilai bahwa hasil evaluasi yang selalu disampaikan secara terbuka kepada siswa dan pelaporan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Dinas Pendidikan sangat baik. Sementara guru menilai sangat baik terkait hasil evaluasi yang selalu disampaikan secara terbuka kepada siswa dan secara umum hasil evaluasi yang dilakukan tergolong sangat memuaskan. Seirama dengan kepala sekolah dan guru, siswa juga memberikan penilaian yang sangat baik atas kedua hal tersebut.⁴⁴

Tujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menyelenggarakan PTJJ SMA Terbuka dan SMK PJJ adalah untuk meningkatkan APK. APK melalui akses bagi masyarakat Indonesia yang terkendala oleh kondisi geografis, keterbatasan waktu, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial budaya. Dengan demikian program ini masih berfokus pada meningkatkan akses bagi anak-anak dan mendorong mereka agar bersekolah. Program PTJJ ini adalah upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, keselaraasan dan kepastian mendapatkan layanan pendidikan serta mengejar APK di tahun 2017 dan 2018. Jumlah remaja usia-16-21 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan sekolah menengah cukup tinggi. APK sekolah menengah di Jawa Barat baru mencapai 76,6%, yang merupakan terendah kedua se-Indonesia setelah Provinsi Papua. APK yang rendah ini diharapkan mampu meningkat hingga mencapai angka 90,8% pada tahun 2018. Program ini dilaksanakan mulai tahun ajaran 2017/2018 di berbagai wilayah di seluruh penjuru Provinsi Jawa Barat.

APK tahun 2019 88.02% dgn jumlah 1.721.304 dari total 2.515.100 jiwa penduduk dengan usia 16 sd 18. APK tahun 2018 83.81% dgn jumlah 1.621.108 dari total 2.516.800 jiwa penduduk dengan usia 16 sd 18. APK tahun 2017 81.25% dgn jumlah 1.516.204 dari total 2.500.300 jiwa penduduk dengan usia 16 sd 18. APK tahun 2016 76.62% dgn jumlah 1.429.529 dari total 2.482.200 jiwa penduduk

⁴⁴ Riyana, C. (2018). Evaluasi implementasi program pendidikan jarak jauh pada jenjang SMK di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

dengan usia 16 sd 18. Dengan demikian terjadi kenaikan APK yang cukup signifikan sejak dilaksanakannya program ini pada tahun 2017. Namun peningkatan secara kuantitas tidak selalu diiringi dengan kualitas pembelajaran. Merujuk pada ulasan pokok-pokok bahasan di atas, masih terdapat kesenjangan-kesenjangan, misalnya proses pembelajaran yang mengacu kepada Permendikbud 22 2016 yaitu proses pendidikan dengan indikator: Pertama, sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan. Kedua, proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Ketiga, pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran. Terjadi kesenjangan, misalnya, dalam proses pembelajaran untuk jumlah, dan waktu pertemuan. Proses pembelajaran ada yang hanya tatap muka saja. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Sekolah ada yang secara berkala setiap bulan, ada yang setiap triwulan sekali, dan belum dilengkapi dengan instrumen monitoring yang memadai.

Terkait aspek infrastruktur, hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kapasitas dan daya tampung pada sekolah induk memadai namun pada beberapa TKB belum memadai. Kedua, sarana prasarana pada sekolah induk lengkap pada TKB hampir seluruhnya tidak lengkap terutama sarana prasarana pembelajaran *on-line*. Ketiga, sekolah induk memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak, TKB hampir seluruhnya tidak. Namun terjadi kesenjangan sarana dan prasarana di hampir seluruh TKB (Thaib 2019).⁴⁵ Penyelenggara menggunakan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang sarana dan prasarana sebagai acuan dengan indikator: Pertama, kapasitas daya tampung sekolah memadai. Kedua, sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak. Ketiga, sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak.

Untuk SMK PJJ, responden menilai ketersediaan infrastruktur pada program ini masih dalam taraf yang kurang baik. Kurangnya fasilitas memang hal yang paling banyak dikeluarkan secara langsung baik oleh guru maupun siswa. Ini dilihat bukan saja pada aspek sarana pembelajaran tapi juga akses terhadap pembelajaran itu sendiri. Variabel ini dinilai sebagai tantangan utama dalam mensukseskan program SMK PJJ Jawa Barat. Di samping infrastruktur

⁴⁵ Thaib, D. (2019). Studi evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

pendukung pembelajaran seperti ketersediaan komputer dan akses internet di daerah domisili siswa, terbatasnya waktu dan ketersediaan fasilitas sekolah juga menjadi penghalang bagi siswa untuk melakukan inetraski dengan sumber belajar utama. Di samping itu fasilitas praktik yang sesuai dengan program keahlian siswa di daerah asal siswa juga sulit untuk diakses pada beberapa program keahlian, Seluruh responden menganggap ini sebagai tantangan terbesar pelaksanaan PJJ SMK Jawa Barat (Riyana 2018).

Kepala sekolah memberikan penilaian bahwa pembentukan kompetensi kejuruan siswayang difasilitasi tutor industri telah dilaksnakan cukup baik. Akses bagi siswa kepada fasilitas pendukung seperti komputer, internet dan fasilitas praktik cukup baik, walaupun tersedia hanya ketika berada di sekolah. Kemitraan dengan dunia usaha dan industri juga telah diimplementasikan sekolah untuk memastikan akses siswa pada sumber daya praktik. Bentuk kemitraan yang dilakukan pada lingkup penyediaan sarana praktik tersebut memang telahg dilakukan namun bekum secara maksimal memenuhi kebutuhan siswa. Kualitas fasilitas pendukung di sekolah iunduk dan TKB memadai namun akses terhadapnya terbatas karena siswa hanya dapat mengaksesnya pada hari Sabtu dan Minggu.

Beberapa upaya sekolah dalam memfasilitasi pembelajaran SMK PJJ di antaranya dengan memberikan pemahaman kepada pengelola terkait integrasi PTJJ pada sekoiah regular, juga memberikan pelatihan pada guru-guru mengenai bersama dengan tutor dan teknsi yang mengikuti pelatihan terkait. Di samping itu juga melakukan pengelolaan infrastruktur pembelajaran. Responden kepala sekolah menganggap keseluruhan upaya ini sangat baik. Reponden guru meyakini bahwa siswa mendapatkan akses terhadap fasilitas pendukung seperti komputrer, internet dan fasilitas praktik lainnya. Sebagian guru berpendapat bahwa akses tersebut telah disiapkan sekolah dengan fasilitas yang relevan. Namun pemerataan fasilitas di TKB masih belum merata, ada yang TKB yang memiliki failitas yang memadai, namun sebagian besar TKB masih belum memiliki fasilitas yang memadai. Perangkat TIK seperti komputer dan internet dapat diakses dengan mudah dengan ketersediaan faislitas di sekolah. Siswa mengakui kemudahan individu dalam mengakses fasilitas tersebut. Tantangan utama yang dihadapi sebagian besar siswa adalah masih terbatasnya

kesempatan dan akses praktikum yang seyogyanya dilaksanakan di lembaga perusahaan/industri. Salah satu penyebabnya adalah jumlah siswa yang melampaui kapasitas daya tampung yang dimiliki industri yang ada, kendati demikian ada beberapa industri yang mampu menampung seluruh siswa di sekolah dan TKB.⁴⁶

Ketersediaan infrastruktur termasuk internet menjadi tantangan terbesar dalam upaya mensukseskan program ini. Di samping infrastruktur pendukung pembelajaran seperti ketersediaan komputer dan akses internet di daerah domisili siswa, terbatasnya waktu dan ketersediaan fasilitas sekolah juga menjadi hambatan bagi siswa untuk melakukan interaksi dengan sumber belajar utama. Namun khusus untuk SMK PJJ pembentukan kompetensi kejuruan siswa yang difasilitasi tutor industri telah cukup baik. Akses bagi siswa kepada fasilitas seperti komputer, internet dan fasilitas praktik cukup memadai, meskipun tersedia hanya ketika berada di sekolah. Kemitraan dengan DUDI juga telah membantu akses siswa pada sumber daya praktik, walaupun belum secara maksimal memenuhi kebutuhan siswa. Secara umum kualitas fasilitas pendukung SMK PJJ di sekolah induk dan TKB memadai tapi tidak semua memiliki fasilitas ini dan kalau ada akses terhadapnya terbatas karena siswa hanya dapat mengunjunginya pada akhir pekan. Secara keseluruhan, dari total 312 SMA Terbuka hanya 20% yang menggunakan fasilitas internet. Sementara dari total 1800 SMK PJJ hanya 40% yang menggunakan fasilitas internet (Fazhar Restu, wawancara, 14 Juni 2020). Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi untuk mendukung program ini masih belum optimal.⁴⁷

Satu contoh *best practice* adalah SMAN 5 Bandung, di mana proses pembelajaran sudah baik karena mayoritas pembelajaran sudah menggunakan perangkat TIK dan Learning Management System (LMS) sehingga pembelajaran di TKB dapat dipantau langsung oleh sekolah induk. Untuk siswa yang tidak memiliki perangkat TIK pun sudah dibekali modul belajar mandiri, sehingga siswa walaupun belajar di rumah tetap dapat belajar melalui modul belajar mandiri. Di TKB mayoritas sudah memiliki koneksi internet yang difasilitasi oleh sekolah induk

⁴⁶ Riyana, C. (2018). Evaluasi implementasi program pendidikan jarak jauh pada jenjang SMK di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

⁴⁷ Fazhar Restu, Manajer Jaringan, SEAMOLEC, wawancara 14 Juni 2020.

melalui dana BOS. Terkait PTK, kombinasi antara siswa, guru, dan tutor sudah sesuai dengan peraturan, sehingga siswa dapat terfasilitasi pembelajarannya oleh tutor maupun guru. PTK sudah baik dalam kompetensi pedagogi digital dan kemampuan TIK. Menyangkut output, tahun ini menyelenggarakan ujian sekolah karena ujian nasional sudah dihapus, hasilnya belum ada namun diprediksi akan cukup baik karena proses yang berlangsung juga cukup baik. Terkait infrastruktur, pembelajaran sudah mayoritas menggunakan TIK sehingga internet sudah digunakan di sekolah induk maupun di TKB.⁴⁸

Contoh *best practice* berikutnya adalah SMK Nurussalam Salopa Tasik yang berbasis pesantren. Proses pembelajaran cukup baik karena mayoritas pembelajaran sudah menggunakan perangkat TIK dan Learning management System (LMS) sehingga pemantauan pembelajaran di TKB dapat dipantau langsung oleh sekolah induk. Untuk siswa yang tidak memiliki perangkat TIK pun sudah dibekali modul belajar mandiri, sehingga siswa walaupun di rumah tetap dapat belajar melalui modul belajar mandiri. Di TKB mayoritas sudah memiliki koneksi internet yang difasilitasi oleh sekolah induk melalui dana BOS, karena SMK harus ada TKB Praktik karena SMK ini membuka kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura sehingga untuk praktiknya memanfaatkan lahan-lahan kosong milik pesantren dan milik masyarakat sekitar, selama praktik di lahan pun siswa didampingi oleh tutor dari penyuluh pertanian dan tutor yang disediakan oleh sekolah sendiri. Sehingga antara pengetahuan dan pelajaran berbasis praktiknya dapat diakomodir dengan baik oleh SMK ini. Terkait PTK, kombinasi antara siswa, guru, dan tutor sudah sesuai aturan yang berlaku. Sehingga siswa dapat terfasilitasi pembelajarannya oleh tutor maupun oleh guru. PTK sudah baik dalam kompetensi pedagogi digital dan kemampuan TIK, karena SMK juga harus menyediakan tutor praktik maka SMK ini bekerjasama dengan penyuluh pertanian dari dinas pertanian dan tutor dari pondok pesantren. Menyangkut output, tahun ini menyelenggarakan ujian sekolah karena ujian nasional sudah dihapus, hasilnya belum ada namun diprediksi akan cukup baik karena proses pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan sekolah ini juga cukup baik. Menyangkut infrastruktur, pembelajaran sudah mayoritas

⁴⁸ Fazhar Restu, Manajer Jaringan, SEAMOLEC, wawancara 17 Juli 2020.

menggunakan TIK sehingga infrastruktur internet sudah digunakan di sekolah induk maupun di TKB, hanya saja karena program ini bekerjasama dengan pondok pesantren sehingga untuk TKB di pesantren yang tidak memperbolehkan perangkat TIK masuk ke dalam pesantren, sekolah menyediakan modul cetak untuk perangkat pembelajaran siswa.⁴⁹

Contoh yang belum berhasil adalah SMAN 1 Parung Panjang Bogor. Dalam hal proses pembelajaran, proses pembelajaran menggunakan WhatsApp sehingga sangat sulit untuk melihat rekaman dan arsip pembelajaran siswa. Mayoritas siswa juga tidak memiliki perangkat pendukung TIK, seperti smartphone android, untuk mendukung proses pembelajaran. Mayoritas TKB sulit melaksanakan pembelajaran berbasis TIK karena di lokasi yang cukup jauh ini ini tidak ada terdapat sinyal. Modul belajar mandiri seharusnya dapat menjadi solusi untuk menangani ini, namun sampai dengan tahun kedua pelaksanaan PTJJ sekolah masih belum memiliki modul belajar mandiri. Dengan demikian siswa di TKB tersebut tidak memiliki perangkat pembelajaran apapun. Solusi sementara mereka adalah guru datang secara langsung dari sekolah induk ke masing-masing TKB hanya saja hal ini tetnu saja kurang efektif. Tarkait PTK, mayoritas PTK belum memiliki kompetensi TIK yang memadai apalagi kemampuan kompetensi pedagogi digital. Terkait output, walaupun tahun ini siswa PTJJ akan ada yang lulus hanya saja siswa banyak yang berguguran di tengah jalan atau berpindah ke sekolah reguler dikarenakan layanan PTJJ dari sekolah yang kurang baik sehingga jika melihat proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh sekolah ini memungkinkan outputnya pun akan kurang baik. Menyangkut infrastruktur, internet di sekolah induk masih sangat terbatas, mayoritas TKB tidak ada internet karena sinyal GSM pun tidak masuk.⁵⁰

Contoh berikutnya yang juga masih belum berhasil adalah adalah SMKN 8 Garut. Kompetensi keahlian PTJJ yang dibuka tidak sesuai dengan kebutuhan di lingkungan sekitar yaitu kompetensi keahlian Teknik Komputer dan jaringan (TKJ) padahal yang dibutuhkan adalah kompetensi keahlian perkebunan, atau kerajinan tanga. Diu samping itu kompetensi keahlian TKJ ini merupakan kompetensi keahlian yang sudah memiliki jumlah siswa terbanyak se-Jawa Barat sehingga

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

hanya akan menambah masalah terkait keterserapan di dunia kerja (pengangguran baru), dan juga terkait kebutuhan praktik siswa TKJ memerlukan perangkat praktik yang mahal dan tidak semua peserta didik memiliki akses terhadap perangkat praktik tersebut, apalagi untuk mayoritas peserta didik dari pedesaan. Mayoritas peserta didik tidak bekerja dan/atau bekerja tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang di-PTJJ-kan yaitu bekerja dibidang TKJ. Padahal konsep SMK PJJ adalah untuk memfasilitasi dan mengakomodir masyarakat usia sekolah yang sudah bekerja dan untuk meningkatkan kemampuan keahlian kejuruannya dibidang pekerjaan yang sedang digelutinya. Terkait proses pembelajaran, proses pembelajaran menggunakan WhatsApp sehingga sangat sulit untuk mendeteksi rekaman dan arsip pembelajaran siswa. Mayoritas siswa juga tidak memiliki perangkat pendukung TIK untuk pembelajaran. Mayoritas TKB mengalami kesulitan melaksanakan pembelajaran berbasis TIK karena tidak ada sinyal. Sama seperti kasus sekolah di atas, modul belajar mandiri seharusnya dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan ini. Namun sampai dengan tahun kedua pelaksanaan PTJJ, sekolah belum juga memiliki modul belajar mandiri. Jadi siswa di TKB tersebut tidak memiliki perangkat pembelajaran apapun. Guru terpaksa datang secara langsung dari sekolah induk ke masing-masing TKB hanya saja hal ini dinilai kurang efektif. Karena ini SMK maka harus ada TKB Praktik tetapi sampai tahun kedua berjalannya program PTJJ ini SMK ini belum memiliki TKB Praktik untuk mengakomodir praktik siswa. Siswa lebih diarahkan untuk praktik langsung di sekolah induk secara terbatas yang tentu saja tidak efektif. Terkait PTK, mayoritas PTK belum memiliki kompetensi TIK yang memadai terlebih kemampuan kompetensi pedagogi digital. Dikarenakan jumlah siswa yang lumayan banyak sehingga masih kekurangan tutor/guru dan hal ini akan berimbas kepada kualitas layanan pembelajaran siswa. Tutor praktik pun masih mengandalkan guru honorer yang langsung diadakan oleh sekolah induk, bukan berasal dari industri/praktisi. Menyangkut output, walaupun tahun ini siswa PTJJ kemungkinan akan ada yang lulus, namun banyak siswa yang berguguran di tengah jalan atau berpindah ke sekolah reguler dikarenakan layanan PTJJ dari sekolah yang kurang baik. Dengan demikian jika melihat proses dari pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh sekolah ini memungkinkan output nya pun akan kurang baik. .

Terkait infrastruktur, internet disekolah induk masih sangat terbatas. Mayoritas siswa tidak memiliki perangkat pembelajaran TIK, siswa juga memiliki akses yang terbatas terhadap sumber-sumber belajar untuk memfasilitasi dan mengakomodir praktik kejuruan.⁵¹

15. Peraturan Perundangan-undangan pada Program PTJJ SMA dan SMK di Jawa Barat

Permendikbud No 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebenarnya sudah mengatur beberapa hal. Misalnya, dalam Pasal 1, disebutkan bahwa pendidikan layanan khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi; satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain; sekolah kecil adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan suatu kelompok masyarakat dengan jumlah peserta didik minimal tiga orang; sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraannya menggunakan metode belajar mandiri (Kemendikbud 2013).

Pengelolaan dan penyelenggaraan pada Permendikbud No. 119 Tahun 2014 juga beberapa hal sudah diatur. Misalnya, pada Pasal 1 disebutkan bahwa: Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran; Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; Peserta didik adalah anggota

⁵¹ Ibid.

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan jarak jauh; Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu; Belajar tuntas adalah suatu sistem belajar yang mengutamakan tingkat penguasaan pada level kompetensi tertentu bagi setiap peserta didik; Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PTJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademis dan administrasi, maupun pribadi secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Tutor adalah pendidik memberikan bantuan belajar kepada peserta didik; Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan, baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut TKB adalah bagian dari satuan pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran; Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraannya menggunakan metode belajar mandiri (Kemendikbud 2014).

Akan tetapi masih ada beberapa hal secara tidak spesifik dan tidak jelas seperti misalkan belum terbentuknya tim manajerial di pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun sekolah penyelenggara sehingga terjadi kurangnya koordinasi di internal penyelenggaraan. Hal ini mengakibatkan informasi tidak sampai secara komprehensif ke pihak yang bertanggungjawab di sekolah penyelenggara PTJJ. Peraturan tersebut tidak mengamankan terbentuknya tim manajerial yang dimaksud yang fungsinya sangat penting pada aspek pengelolaan di lapangan. Hal lain yang juga tidak diatur dengan jelas adalah terkait pembiayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah program. Berdasarkan Permendikbud No. 72 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 119 Tahun 2014 di atas, pembiayaan program PTJJ dan sekolah terbuka dapat menggunakan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun karena tidak diatur secara jelas dan spesifik maka terjadi kesenjangan pembiayaan dikarenakan ketentuan yang berlaku sebagian besar sama dengan

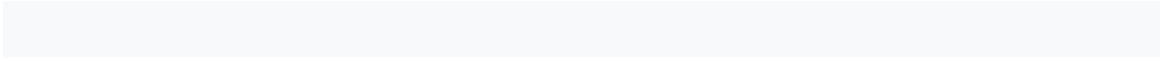
sekolah dengan program pembelajaran reguler tatap muka. Permendikbud No. 119 Tahun 2014 juga mengatur beban mengajar bagi pendidik dan tenaga kependidikan, hanya saja permasalahannya muncul pada tahapan implementasi di lapangan, baik implementasi pada tataran proses pembelajaran maupun tataran administratif.

Proses pembelajaran juga mengacu pada Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang penilaian pendidikan dengan indikator: Pertama, aspek penilaian sesuai ranah kompetensi. Kedua, teknik penilaian obyektif dan akuntabel. Ketiga, penilaian pendidikan ditindaklanjuti. Keempat, instrumen penilaian menyesuaikan aspek penilaian. Kelima, penilaian dilakukan mengikuti prosedur. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, untuk unsur kognitif melalui ulangan harian, ujian semester dan ujian akhir yang soalnya disamakan dengan sekolah induk, terutama untuk untuk mata pelajaran yang termasuk mata pelajaran ujian nasional. Kedua, unsur psikomotorik dan afektif dilakukan oleh guru kunjung/guru bina dan tutor. Ketiga, Ujian Sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah induk harus diikuti oleh seluruh peserta didik kelas terbuka pada semua jenjang. Keempat, kesulitan dalam menilai hasil belajar untuk aspek sikap. Dengan demikian terdapat kesenjangan yang cukup lebar dikarenakan disamakannya standar PTJJ dengan standar tatap muka.

Turunan dari Permendikbud No. 119 Tahun 2014 berupa Sarana Prasarana Sekolah Penyelenggara & Tempat Kegiatan Belajar (TKB) ditetapkan pada Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud No. 1670/D/LK/2014. Disebutkan bahwa TKB harus memiliki sarana: bahan ajar cetak (modul) dan non-cetak (e-books), perangkat komputer dengan jumlah dan spesifikasi memadai; jaringan internet untuk layanan e-pembelajaran, daya listrik dan air, saranapendukung kegiatan pembelajaran (meja+kursi) peserta didik dan tenaga kependidikan TKB, papan tulis, almari/rak buku. Juga harus memiliki prasarana ruang belajar dan ruang administrasi. Namun nampak kurangnya pengawasan pengelola program PTJJ terhadap pemenuhan persyaratan Sekolah Penyelenggara dan TKB, ini terlihat ketika siswa tidak dapat melaksanakan pembelajaran di TKB sehingga pembelajaran siswa terpaksa dilakukan di sekolah penyelenggara. Permendikbud No. 72 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 119 Tahun 2014 juga mengatur sistem informasi yang harus dimiliki sekolah

penyelenggara, namun masih banyak sekolah dan TKB yang tidak memilikinya karena lemahnya pengawasan pada implementasi peraturan tersebut.





BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

PTJJ Jawa Barat yang terdiri dari SMA Terbuka dan SMK PJJ secara kuantitas turut memberikan kontribusi pada kenaikan APK yang merupakan tujuan utama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari diselenggarakannya program ini. Namun peningkatan secara kuantitas tidak selalu diiringi dengan kualitas pengelolaan dan pembelajaran. Program ini mendapatkan dukungan politik yang kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun pada tataran implementasi masih belum sempurna untuk dapat dikatakan memberikan kontribusi yang nyata pada peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama pada aspek tata kelola, proses pembelajaran dan dukungan peraturan perundangan. Dalam bab sebelumnya diberikan contoh beberapa sekolah yang berhasil dan yang belum berhasil menyelenggarakan PTJJ. Berikut beberapa simpulan:

a. Tata Kelola

Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sekolah penyelenggara sehingga informasi tidak disampaikan secara komprehensif ke pihak yang bertanggungjawab di sekolah penyelenggara PTJJ. Banyak sekolah yang mengajukan menjadi penyelenggara program PTJJ, tanpa melakukan analisis kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah. Selayaknya pembukaan program PTJJ dilandasi dengan adanya analisis kebutuhan, dimana program PTJJ ditujukan bagi mereka yang terkendala biaya, jarak, dan waktu kemudian juga dilakukan analisis internal sekolah untuk melihat ketersediaan dan kesiapan perangkat pembelajaran yang memenuhi persyaratan. Segala sesuatunya memang dilakukan dengan perencanaan (*planning*), namun pada tataran pengorganisasian (*organizing*), memimpin (*leading*) dan pengawasan (*controlling*) masih banyak yang harus dibenahi. Pada level sekolah, misalnya, sekolah yang berhasil menunjukkan aspek kepemimpinan kepala sekolah yang ditandai dengan kemampuan manjerial, di antaranya mendelegasikan fungsi

koordinator PTJJ kepada orang lain agar yang bersangkutan bisa lebih fokus menurus hal-hal akademik maupun non-akademik siswa PTJJ. Di samping itu, secara umum juga tidak ada mekanisme yang dilakukan untuk secara menyeluruh mengawasi dan dan menjamin mutu sekolah-sekolah penyelenggara PTJJ.

Dari segi pembiayaan, walaupun sudah diatur melalui Permendikbud No. 119 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 72 Tahun 2013 agar dapat menggunakan dana pemerintah pusat, daerah dan masyarakat namun tidak diatur secara jelas sesuai dengan karakteritisk PTJJ sehingga terjadi kesenjangan karena menganggap program ini layaknya sekolah regular, padahal secara aktivitas kegiatan terutama kegiatan proses pembelajaran sangat berbeda. Misalkan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah memiliki dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya saja pada petunjuk teknis dana BOS yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tidak ada khusus pembiayaan untuk sekolah penyelenggara PJJ.

PTJJ sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan, terlebih saat ini di mana masyarakat bersiap memasuki era *new normal* dengan sikap penuh hati-hati terhadap wabah Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya ini. Situasi ini memunculkan kesadaran bahwa ternyata berbagai aktivitas baik di dunia pendidikan maupun lainnya yang ternyata dapat dikerjakan secara jarak jauh di rumah dengan perangkat digital tanpa harus datang ke sekolah atau ke kantor.

b. Proses Pembelajaran

Pembelajaran dalam PTJJ mengutamakan kemandirian peserta didik. Namun, pada kenyataannya upaya mendorong ke arah kemandirian masih ditemukan kendala, diantaranya karena kurang pemahaman tentang sistem PTJJ, diantaranya karena peserta didik masih memiliki pemikiran bahwa sekolah itu harus di gedung sekolah, peserta didik tidak terbiasa menggunakan perangkat TIK, peserta didik tidak memiliki perangkat TIK atau akses mereka terhadap perangkat TIK juga terbatas, serta peserta didik memiliki keterbatasan waktu karena bekerja sehingga

kurang aktif dalam mengikuti kegiatan tutorial. Pola pembelajaran mandiri untuk pendidikan menengah dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yakni pertama, belajar mandiri secara individual; kedua, belajar mandiri secara berkelompok; dan ketiga, belajar terbimbing melalui tutorial tatap muka. Konsekuensinya adalah bahan ajar yang digunakan oleh peserta didik pada program PTJJ haruslah bahan ajar yang dirancang khusus untuk pembelajar mandiri.

Permasalahannya adalah bahan ajar yang digunakan saat ini mayoritas masih menggunakan bahan ajar pembelajaran reguler tatap muka yang belum ditambahkan suplemen atau desain-desain interaksi untuk menjadi bahan ajar mandiri. Bahan ajar mandiri dapat berupa modul cetak maupun non-cetak yang dirancang khusus untuk belajar mandiri yang dilengkapi dengan panduan belajar bagi siswa dan pedoman bimbingan belajar bagi tutor/gurubina/pamong. Selain bahan ajar, proses penyampaian materi pun tidak dapat disamakan jika merujuk kepada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) reguler tatap muka karena mayoritas proses pembelajaran di PTJJ adalah pembelajaran mandiri dan pemanfaatan media teknologi secara bertahap.

Beberapa keuntungan dari PTJJ yang didukung oleh TIK: *tactical advantages* (keuntungan taktis) yaitu fleksibilitas untuk belajar di mana saja dan kapan saja; mereduksi biaya perjalanan; media untuk melacak, meng-update dan mengatur pembelajaran (melalui Learning Management System) terbukti secara signifikan membantu kelancaran program ini terutama bagi sekolah-sekolah yang cukup berhasil. Berikutnya *training delivery advantages* (manfaat penyelenggaraan pelatihan/pembelajaran) yaitu *consistent delivery* (pemberian materi yang konsisten); pembelajaran yang lebih *personalized*; konten grafik dan animasi yang interaktif; material yang bisa disesuaikan; *self-paced programs* (kecepatan program dapat disesuaikan) sebagian sudah terlaksana namun sebagian masih belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan kompetensi guru dan tutor. Untuk konten grafik dan animasi yang interaktif dan pembelajaran yang kolaboratif juga masih belum dapat terlaksana secara maksimal karena persiapan yang hampir minim

dan juga keterbatasan kompetensi guru dan tutor. Secara umum juga hanya sebagian sekolah dan siswa yang secara relatif optimal menggunakan fasilitas internet.

Mayoritas PTK terutama guru adalah pendidik pada program pembelajaran reguler tatap muka sehingga diperlukan kualifikasi khusus pada pendidik tersebut karena selain penguasaan materi dan pedagogi, pendidik pun diperlukan untuk menguasai teknologi terutama yang berhubungan erat dengan teknologi pendidikan. Sebagian besar belum memiliki kemampuan ini. Terkait beban mengajar pada Permendikbud No. 119 Tahun 2014 pendidik dan tenaga kependidikan sudah diatur, hanya saja permasalahannya muncul pada tahapan implementasi di lapangan, baik implementasi pada tataran proses pembelajaran maupun tataran administratif.

Terkait *output*, berdasarkan pantauan di lapangan bahwa peserta didik PTJJ ini mayoritas merupakan peserta didik yang memiliki keterbatasan akses geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan waktu dalam mengakses pendidikan reguler tatap muka. Kurikulum yang digunakan masih menggunakan kurikulum reguler sehingga terkesan kaku dan bahkan beberapa bagian tidak terlalu dibutuhkan oleh peserta didik yang sebagian sedang magang bekerja atau membantu orang tua. Bahkan, merujuk pada sekolah yang belum berhasil, sekolah tersebut mengambil kompetensi keahlian yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Banyak siswa-siswa yang berguguran atau pindah ke sekolah reguler karena pelayanan PTJJ yang tidak maksimal dari sekolah-sekolah yang belum berhasil ini, sementara siswa-siswanya yang masih bertahan juga diprediksi akan menjadi *output* yang juga kurang baik kualitasnya.

Menyangkut infrastruktur, hanya 20% dari total 312 SMA Terbuka dan hanya 40% dari total 188 SMK PJJ yang menggunakan TIK. Dikarenakan masih terbatasnya pemenuhan akses TIK secara perangkat maupun secara individu (guru, tutor, siswa) sehingga pembelajaran yang terjadi mayoritas menggunakan modul cetak. Banyak juga siswa yang terpaksa belajar di sekolah penyelenggara karena TKB tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan. Ada juga sarana prasarana dalam bentuk

Sistem Informasi baik sistem informasi pembelajaran maupun sistem informasi akademik, dan dimana masih banyak sekolah penyelenggara yang menjalankan PTJJ berdasarkan Permendikbud No. 72 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 119 Tahun 2014 yang tidak memenuhi kepemilikan sistem informasi tersebut.

c. Peraturan Perundangan-undangan

Pengelolaan dan penyelenggaraan pada Permendikbud No. 119 Tahun 2014 beberapa hal sudah diatur, tetapi masih ada beberapa hal secara tidak spesifik dan tidak jelas seperti misalkan belum terbentuknya tim manajerial di pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun sekolah penyelenggara sehingga terjadi kurangnya koordinasi di internal penyelenggaraan. Hal ini mengakibatkan informasi tidak sampai secara komprehensif ke pihak yang bertanggungjawab di sekolah penyelenggara PTJJ.

Berdasarkan Permendikbud No 119 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 72 Tahun 2013, pembiayaan program PTJJ dan sekolah terbuka dapat menggunakan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun karena tidak diatur secara jelas dan spesifik terjadi kesenjangan pembiayaan dikarenakan ketentuan yang berlaku sebagian besar sama dengan sekolah dengan program pembelajaran reguler tatap muka.

Permendikbud No 119 Tahun 2014 sudah mengatur beban mengajar bagi pendidik dan tenaga kependidikan, hanya saja permasalahannya muncul pada tahapan implementasi di lapangan, baik implementasi pada tataran proses pembelajaran maupun tataran administratif. Karena itu perlu ada pengawasan yang lebih ketat terkait implementasi peraturan ini. Proses pembelajaran juga mengacu pada Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Dengan demikian terdapat kesenjangan yang cukup lebar dikarenakan disamakannya standar PTJJ dengan standar tatap muka.

Turunan dari Permendikbud No. 119 Tahun 2014 berupa Sarana Prasarana Sekolah Penyelenggara & Tempat Kegiatan Belajar (TKB)

ditetapkan pada Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud No. 1670/D/LK/2014. Kurangnya pengawasan (*controlling*) pengelola program PTJJ terhadap pemenuhan persyaratan Sekolah Penyelenggara dan TKB menjadi permasalahan saat siswa tidak dapat melaksanakan pembelajaran di TKB sehingga pembelajaran siswa dilakukan di sekolah penyelenggara. Permendikbud No. 72 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 119 Tahun 2014 juga mengatur sistem informasi yang harus dimiliki sekolah penyelenggara, namun karena lemahnya pengawasan pada implementasi peraturan tersebut masih banyak sekolah dan TKB yang tidak memilikinya

17. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pendidikan terbuka dan jarak jauh jenjang pendidikan menengah di Indonesia, adalah sebagai berikut:

a. Tata Kelola

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis PTJJ di setiap daerah yang akan menyelenggarakan program PTJJ yang memungkinkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah juga perlu mengatur pembiayaan yang harus saling membantu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam masalah pembiayaan pemerintah daerah pun harus ikut andil dan mengambil bagian karena sesuai dengan UU Otonomi daerah bahwa tata kelola pendidikan dasar dan menengah adalah kewenangan dari pemerintah daerah.

b. Proses Pembelajaran

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat bahan ajar yang dirancang khusus untuk pembelajar mandiri. Bahan ajar yang ada dapat dilengkapi dengan suplemen atau desain-desain interaksi untuk menjadi bahan ajar mandiri. Bahan ajar mandiri dapat berupa modul cetak maupun non cetak yang

dirancang khusus untuk belajar mandiri yang dilengkapi dengan panduan belajar bagi siswa dan pedoman bimbingan belajar bagi tutor/gurubina/pamong.

Pada saat yang sama para pakar pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu didorong untuk menemukan terobosan-terobosan pedagogi baru yang bukan hanya akan memperkaya pengalaman belajar siswa agar lebih bermakna, namun juga membuat penyelenggaraan pendidikan semakin efektif dan efisien. Karena itu PTJJ memiliki peluang pengembangan yang sangat potensial baik saat ini maupun di masa yang akan datang, lebih khusus dengan adanya wabah Covid-19 yang telah mendorong proses perubahan pola hidup masyarakat.

Terkait PTK, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memberikan pelatihan khusus bagi para PTK PTJJ karena kekhasannya yang berbeda dengan PTK reguler. Para pendidik memerlukan kualifikasi khusus karena selain penguasaan materi dan pedagogi, pendidik pun diperlukan untuk menguasai teknologi terutama yang berhubungan erat dengan teknologi pendidikan. Selain standar PTK yang sudah tercantum pada SNP reguler tatap muka, pada program PTJJ ada beberapa hal yang perlu diatur kembali seperti misalkan beban mengajar, kualifikasi PTK, dan kompetensi PTK.

Menyangkut output, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyusun kurikulum tersendiri yang memberikan penekanan pada penekanan pada peningkatan keterampilan hidup (*life skills*) yang mengacu kepada peningkatan kualitas peserta didik yang dapat bermanfaat untuk menopang kehidupannya kelak. Selain itu menurut data dari beberapa sekolah penyelenggara yang sudah berjalan, mayoritas peserta didik sudah magang bekerja sehingga diharapkan ada keluwesan cara penyampaian materi kurikulum yang digunakan walaupun tetap menggunakan kurikulum nasional yang berlaku di pendidikan reguler tatap muka. Ini akan berdampak pada kualitas outputnya nanti.

Mengenai infrastruktur, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu membuat kebijakan yang mengatur standar pemenuhan sarana prasarana untuk menunjang

program PTJJ di satuan pendidikan. Kebijakan ini ini harus diperkuat juga oleh pengawasan dari pihak-pihak terkait baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun penguatan infrastruktur sarana-prasarana dari pemerintah daerah. Pemerintah juga perlu memperkuat dan memperluas infrastruktur yang mendukung di antaranya fasilitas internet. Tentu saja pihak pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pihak swasta dan para pemangku kepentingan terkait lainnya juga perlu didorong untuk memperluas pelayanannya agar bisa menjangkau masyarakat di seluruh penjuru tanah air.

c. Peraturan Perundangan-undangan

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat peraturan bukan hanya terkait pengawasan namun juga penjaminan mutu terhadap sekolah penyelenggara program PTJJ oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program PTJJ pada jenjang pendidikan menengah memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengingat Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa kewenangan tata kelola pendidikan menengah berada di pemerintah daerah provinsi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengeluarkan peraturan yang lebih rinci dan mengacu kepada kekhasan PTJJ, proses pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar dikarenakan disamakannya standar penilaian PTJJ dengan standar penilaian tatap muka.

Terkait pembiayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat panduan/petunjuk teknis khusus untuk program PTJJ sehingga tidak campur aduk dengan BOS program reguler tatap muka. Panduan/Juknis BOS khusus PTJJ ini harus mengakomodir prinsip dan karakteristik pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Menyangkut beban mengajar, permasalahan yang ada dapat ditangani dengan merancang standar isi dan standar proses khusus PTJJ. Maka untuk memenuhi hal tersebut perlu ada peraturan lain yang dapat

mengatur standar beban mengajar, kualifikasi, kompetensi, dan hal lainnya terkait PTK pada program PTJJ, dengan demikian peraturan yang ada masih belum cukup memadai persoalan ini.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu membuat mekanisme pengawasan implementasi peraturan mengenai sarana prasarana dan sistem informasi. Bercermin pada permasalahan yang ditemukan di lapangan, pemerintah perlu merancang peraturan yang mengatur secara lebih detail mengenai standar pemenuhan sarana prasarana untuk menunjang program PTJJ di satuan pendidikan.



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR PUSTAKA

Adji, S. S., et al. (2011). "The use of e-learning in distance education: Online tutorial in Faculty of Education and Teacher Training Universitas Terbuka." Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning **V**: 21-40.

Akbar, D. H. K. b. H. (2010). "The development of information and communication technology in education in Brunei Darussalam." Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning **IV**: 1-15.

Allen, M. W. (2016). Guide to e-learning. New Jersey, John Wiley & Sons.

Bandalaria, M. d. P. (2018). "Open and distance elearning in Asia: Country initiatives and instructional cooperation for the transformation of higher education in the region." Journal of learning for development **5**(2): 116-132.

BINUS (2020). "Sejarah Binus." Diunduh 1 Mei, 2020, from <http://web.binus.edu/About.BINUS/Sejarah.BINUS/Indonesia>.

Daft, R. L. (2010). Management. Mason, South-Western Cengage Learning.

Kemendikbud (2013). Permendikbud No 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Khusus. Kemendikbud. Jakarta, Kemendikbud.

Kemendikbud (2014). Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka. D. P. P. K. d. L. K. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemendikbud (2014). Permendikbud No 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jarak jauh pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemendikbud. Jakarta, Kemendikbud.

Kemendikbud (2020). "Sistem Informasi APK-APM." Diunduh 25 Juni, 2020, from <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>.

Kemendikbud (2020). Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Krishartomo, T. (2011). "Using internet and multimedia technology to develop an integrated e-learning media than can guide, facilitate and improve the quality of cooperative learning activities." **V**: 41-73.

Kusmawan, U. and T. Belawati (2010). "The role of ICT in open and distance education partnership." Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning IV: 24-36.

Latip, A. (2017). Tantangan SMA Terbuka di Jawa Barat. Kompasiana.

Lemhannas (2020). Kewaspadaan nasional. Jakarta, Lemhannas.

Lubin, G. (2013). "Incredible things that happen every 80 seconds on the internet." Dunduh 28 April, 2020 <http://www.businessinsider.com/incredible-things-that-happen-every-60-seconds-on-the-internet-2011-12?IR=T>.

OECD (2015). Reviews of National Policies for Education: Education in Indonesia, Rising to Challenge, OECD.

Panen, P. (2016). Kebijakan pendidikan jarak jauh dan e-learning di Indonesia. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2013). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2017). Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang PPDB 2017/2018. P. P. J. Barat. Bandung.

Perraton, H. (2012). Theory, evidence and practice in open and distance learning. Oldenburg, BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Que, P. V. and T. D. Vuong (2010). "ICT-based education for development: The case of Vietnam." Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning IV: 86-99.

Riyana, C. (2018). Evaluasi implementasi program pendidikan jarak jauh pada jenjang SMK di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

Riyana, C. (2019). Studi analisis implementasi kebijakan program pendidikan jarak jauh (PJJ) pada jenjang SMK di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

Rosser, A. (2018). Beyond access: Making Indonesia's education system work. Victoria, Lowy Institute.

Sethy, O. (2010). "Open and distance education in Cambodia." Southeast Asian Journal on Open and Distance Learning IV: 100-124.

Siaran Pers Mendikbud (2020). Cegah sebaran Covid-19 di satuan pendidikan, Kemendikbud gandeng swasta siapkan solusi belajar daring. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sukasni, A. and H. Efendy (2017). "The problematic of education system in Indonesia and reform agenda." Internartional Journal of Education **9**(3): 183-199.

Tam, G. and D. El-Azhar (2020). "Three ways the Corona virus pandemic could reshape education." Diunduh 2 April, 2020 <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3-ways-coronavirus-is-reshaping-education-and-what-changes-might-be-here-to-stay/>.

Thaib, D. (2018). Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

Thaib, D. (2019). Studi evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat. Jakarta, SEAMOLEC.

UMN (2020). "Universitas Multimedia Nusantara." Diunduh 1 Mei, 2020 <https://www.umn.ac.id/>.

UNDP (2019). Inequalities in Human Development in the 21st Century. New York, UNDP.

UNESCO (2020). "Global monitoring of school closures caused by COVID-19." Diunduh 2 April, 2020 <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>.

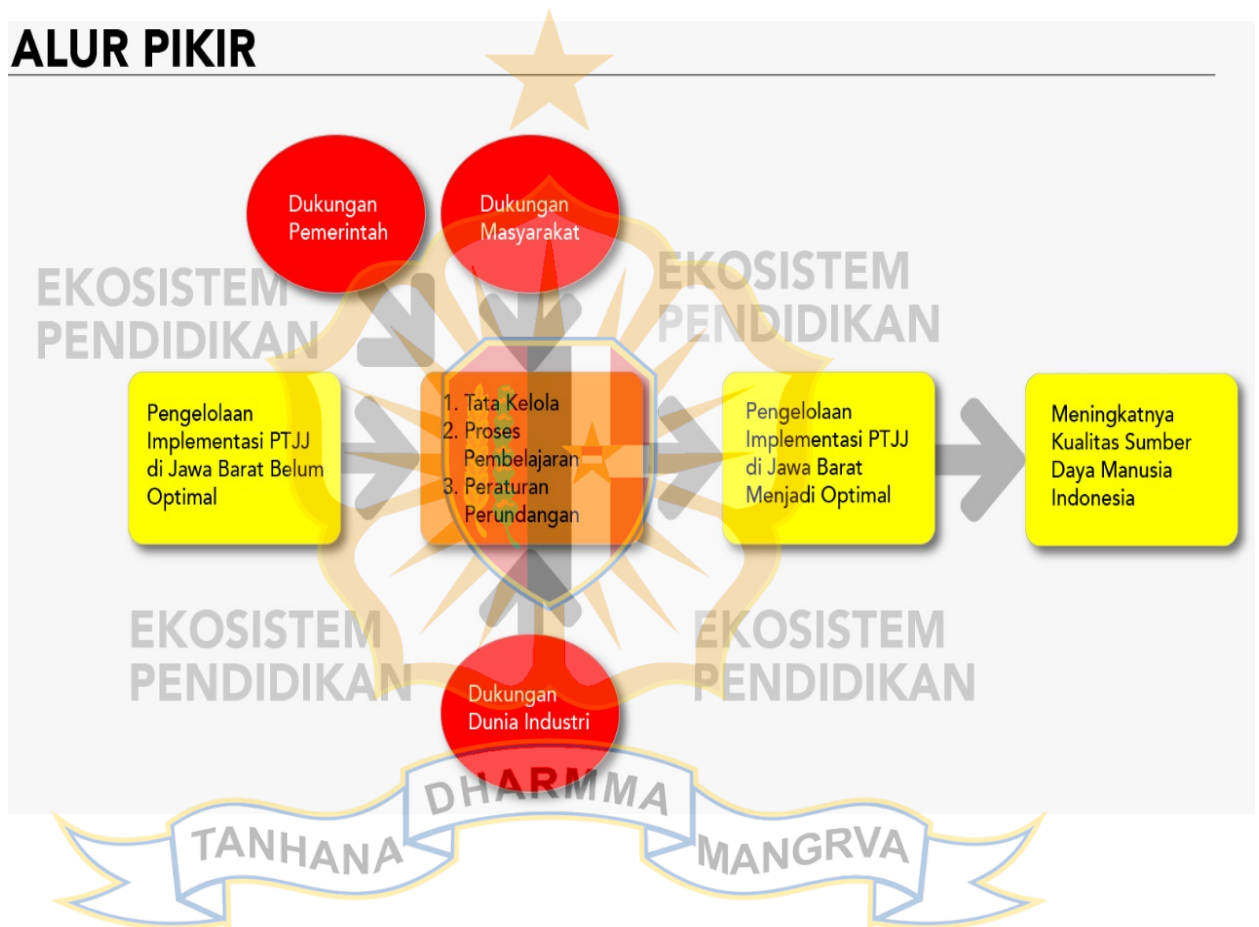
UNICEF (2019). Every child learns: UNICEF Education Strategy 2019-2030. New York, UNICEF.

UU No 20 (2003). UU No 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta, Pemerintrah RI.



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

ALUR PIKIR



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : R. Alpha Amirrachman, M.Phil.,Ph.D.
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 28 November 1970
 Alamat : Villa Bintaro Regency Blok K-1 No 25.
 Pondok Kacang Timur, Pondok Aren,
 Tangerang Selatan, Banten
 No HP : 081318002282

Pendidikan:

- 2013-2014, Post-Doctoral Research Fellow, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS,) Singapura.
- 2012, Post-Doctoral Research Fellow, Royal Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV), The Netherlands.
- 2008-2012, Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam Social Science dari Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), Universiteit van Amsterdam, The Netherlands.
- 2002-2004, Master of Philosophy (M.Phil.) in Education dari School of Policy and Practice, Faculty of Education and Social Work, The University of Sydney, Australia.
- 2002, Graduate Certificate in Educational Studies, Faculty of Education and Social Work, The University of Sydney, Australia.
- 1995-1999, Sarjana Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
- 1986-1989, SMAN 57 Jakarta.
- 1988, Twin Falls, Idaho, AS.

Pekerjaan:

- 2015-sekarang, Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- 2015-sekarang, Wakil Ketua, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
- 2019-sekarang, Direktur, Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Center.
- 2017-2019, Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
- 2005-sekarang, Dosen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 2014-2016, Direktur Eksekutif, Centre for Dialogue and Coperation among Civilization, pimpinan Prof. Dr. Din Syamsuddin.
- 2010-2012, Bendahara, Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah, Belanda.
- 2006-2010, Anggota Bidang Kader dan Pengembangan Sumber Daya Insani, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
- 1996-1997, Ketua Bidang Hikmah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Komisariat Uhamka Jakarta Selatan.

